

Published 13430 / Warningsih et al. / ANALISIS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE DI DESA KELAPA PATI [View](#) [Activity Log](#) [Library](#)

Workflow **Publication**

Submission **Review** Copyediting Production [Help](#)

**Submission Files** [Q Search](#) [Upload File](#)

37331-1	kurniasih_nia, Jurnal Analisis Kelembagaan Ekosistem Mangrove Desa Kelapa Pati.docx	March 30, 2020	Article Text
---------	---	----------------	--------------

[Download All Files](#)

**Pre-Review Discussions** [Add discussion](#)

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
No Items				

Submission published. [Change decision](#)

**Participants** [Assign](#)

**Journal editor**

- Esa Hidayat

**Author**

- Dr. Trisla Warningsih

**Editor Decision** ✕

**Participants** [Edit](#)

Dr. Trisla Warningsih (trisla)  
Esa Hidayat (esafajarh21)

**Messages**

Note	From
<p>Dr. Trisla Warningsih:</p> <p>We have reached a decision regarding your submission to Jurnal Socioteknologi, "ANALISIS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE DI DESA KELAPA PATI".</p> <p>Our decision is to: Require The Revision. Please submit the correction article before December 16, 2020</p> <p>Esa Hidayat esafajarh@gmail.com</p> <p>.....</p> <p>Reviewer A:</p> <p>Apakah naskah ini?: _____ Relevan</p> <p>.....</p>	<p>trisla 2020-12-09 02:14 AM</p>

[Add discussion](#)

Replies Closed

1

7 01:06

Bagaimanakah Tingkat Keterbacaan Naskah Ini Untuk dipahami?:  
Bagaimanakah Detail Penulisan Naskah Ini? (jika jawabannya tidak, uraikan penjelasan dalam D):  
Bagaimanakah Nilai Keseluruhan Naskah Ini?:  
Bagaimanakah Rekomendasi Terhadap Naskah Ini?:  
Kebaruan:  
Komentar untuk Perubahan:  
.....

---

Jurnal Sosioteknologi  
<http://journals.itb.ac.id/index.php/sostek>

▶ Dr. Trisla Warningsih:

trisla  
2020-12-17 01:06  
AM

We have reached a decision regarding your submission to Jurnal Sosioteknologi, "ANALISIS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE DI DESA KELAPA PATI".

Our decision is to: accept your submission.

Regards,  
Esa Hidayat  
esafajarh@gmail.com

---

Jurnal Sosioteknologi  
<http://journals.itb.ac.id/index.php/sostek>

Add Message

SUBMISSION ARTICLE  
FILE 37331-1  
TANGGAL 30 MARET 2020

# ANALISIS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE DI DESA KELAPA PATI

Trisla Warningsih<sup>1</sup>, Wardatul Hidayah<sup>2</sup>, Rasoel Hamidi<sup>3</sup>

*Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Perikanan  
dan Kelautan Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km 12,5, Simpang Baru  
Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, 28293. Telp 0761-63266*

email: trisla.t.warningsih@lecturer.unri.ac.id

## ABSTRAK

Degradasi ekosistem mangrove di Kabupaten Bengkalis terjadi salah satunya disebabkan oleh pengelolaan ekosistem mangrove yang masih belum optimal. Penelitian analisis kelembagaan pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati dilaksanakan pada bulan November 2019 di ekosistem mangrove Desa Kelapa Pati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Penilaian peran kelembagaan pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati dilakukan berdasarkan wawancara yang mendalam kepada informan berupa *stakeholder* yang telah dipilih. Analisis kelembagaan ekosistem mangrove menunjukkan bahwa kelembagaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati dikelompokkan menjadi: *Key player* (Pengelola, Kepala Desa, Bupati, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten), *context setters* (DPRD), *crowds* (Dinas PU, BAPPEDA, Dinas Perikanan, LSM, dan Perguruan Tinggi); dan *subject* (masyarakat dan tokoh masyarakat).

Kata Kunci: Analisis kelembagaan, ekosistem mangrove, Stakeholder, Desa Kelapa Pati

## ABSTRACT

*The degradation of mangrove ecosystems in Bengkalis Regency is caused either one by mangrove ecosystems management that are still not optimal. The research of institutional analysis of mangrove ecosystem management in Kelapa Pati Village was conducted in November 2019 in the mangrove ecosystem of Kelapa Pati Village, Bengkalis District, Bengkalis Regency. The assessing of institutional role about mangrove ecosystems management in Kelapa Pati Village was carried out based on in-depth interviews with informants in the form of selected stakeholders. Institutional analysis of mangrove ecosystems shows that the mangrove ecosystem institutions in Kelapa Pati Village are grouped into: Key players (Managers, Village Heads, Regents, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten), context setters (DPRD), crowds (Dinas PU, BAPPEDA, Dinas Perikanan, NGO, and University); and subjects (community and community leaders).*

*Keywords: Institutional analysis, mangrove ecosystem, Stakeholder, Kelapa Pati Village*

## PENDAHULUAN

Ekosistem mangrove adalah ekosistem yang didominasi oleh kelompok tumbuhan yang tipe pertumbuhannya dikategorikan ke dalam pohon, perdu, dan semak yang mampu hidup pada kondisi salinitas tinggi (Nybakken, 1982). Ekosistem mangrove memainkan peran penting, salah satunya dalam bidang ekologi, yaitu sebagai habitat bagi biota perairan, seperti udang, ikan, dan kepiting (Fauzi, 2004). Degradasi ekosistem mangrove adalah permasalahan yang banyak

terjadi pada berbagai kawasan pesisir pantai. Degradasi luas kawasan secara intens mengalami peningkatan signifikan (Bratasida, 2002).

Degradasi ekosistem mangrove salah satunya terjadi di Kabupaten Bengkalis. Pada Tahun 2011 luas ekosistem mangrove adalah sebesar 40.916 ha, luas tersebut menyusut pada Tahun 2015 menjadi 33.016 ha (BPS, 2016). Hasil penelitian Jhonnerie *et al.* (2014) juga menunjukkan bahwa telah terjadi pengurangan sebesar 197,2 hektar terhadap tutupan ekosistem mangrove dari Tahun 1996-2013 di Sungai Kambung Kabupaten Bengkalis. Dampak yang ditimbulkan dari degradasi ekosistem mangrove di Kabupaten Bengkalis salah satunya adalah terjadinya abrasi di pesisir kawasan tersebut. Hasil penelitian Sutikno (2014) menunjukkan bahwa pada rentang waktu 26 tahun (1988 - 2014) rata-rata laju abrasi di Pulau Bengkalis adalah seluas 59 ha /tahun. Abrasi tersebut telah menyebabkan berkurangnya luas daratan dengan rata-rata 42,5 ha /tahun.

Degradasi ekosistem mangrove di Kabupaten Bengkalis terjadi salah satunya disebabkan oleh pengelolaan ekosistem mangrove yang masih belum optimal. Pengelolaan ekosistem mangrove seperti di kawasan lainnya melibatkan berbagai pihak dalam menentukan kebijakan terkait dengan ekosistem mangrove di kawasan tersebut. Kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove belum mampu menghasilkan keputusan yang melibatkan dan mengikutserakan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan, sehingga hasil keputusan banyak tidak sesuai dengan kepentingan pihak lain. Kebijakan tersebut pada akhirnya memicu terjadinya konflik kepentingan sehingga pada akhirnya menimbulkan degradasi sumberdaya alam. Upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan mengantisipasi konflik telah diupayakan, namun dalam kenyataannya belum mampu mengatasi kerusakan yang terjadi.

Penelitian analisis kelembagaan terhadap pengelolaan ekosistem mangrove perlu untuk dilaksanakan agar dapat memetakan pihak atau *stakeholder* yang memiliki pengaruh dan kepentingan di ekosistem mangrove Desa Kelapa Pati.

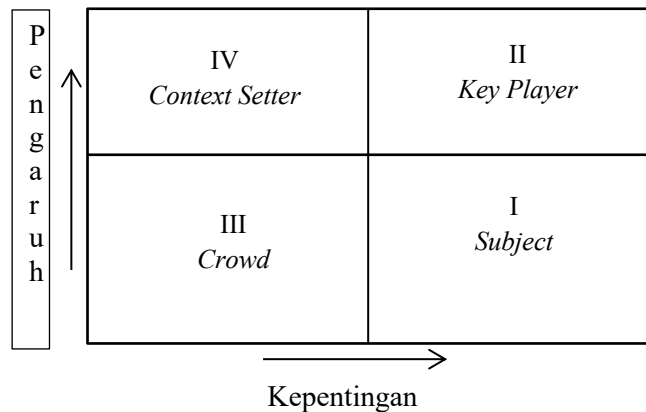
## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian analisis kelembagaan pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati dilaksanakan pada bulan November 2019 di ekosistem mangrove Desa Kelapa Pati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Informan pada penelitian ini adalah para pakar yang dinilai memiliki pengetahuan tentang pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati. Informan yang diwawancara adalah Pengelola, Kepala Desa, 2 orang yang berasal dari Dinas Perikanan, 2 orang yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup, 1 orang anggota DPR, dan 1 orang perwakilan masyarakat. Informan dipilih oleh peneliti dengan alasan bahwa mereka merupakan pimpinan secara formal yang ada di Desa Kelapa Pati, yang dianggap oleh peneliti sebagai orang-orang yang mengetahui tentang objek yang diteliti. Pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati dianalisis berdasarkan analisis para pihak.

Analisis para pihak pada pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati dilakukan berdasarkan wawancara yang mendalam kepada informan berupa *stakeholder* yang telah dipilih dengan pemberian skor mulai dari 0 (tidak

mempunyai pengaruh), 1 (mempunyai pengaruh yang lemah), 2 (mempunyai pengaruh yang sedang), dan 3 (mempunyai pengaruh yang kuat).

Hasil skor yang diperoleh dari informan selanjutnya dipilih berdasarkan jawaban nilai yang sering muncul, selanjutnya dianalisis berdasarkan *stakeholders grid* dengan memasukkan nilai skor ke dalam *Microsoft Excel*. Nilai yang dimasukkan ke dalam *Microsoft Excel* akan membentuk matriks sehingga selanjutnya akan diketahui posisi *stakeholder* yang mengindikasikan peranan setiap *stakeholder* dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati (Gambar 1).



Gambar 1 Matriks Tingkat Pengaruh dan Kepentingan *Stakeholder* (Reed *et al.* 2009)

## HASIL PENELITIAN

*Stakeholder* yang berperan dalam pengelolaan ekosistem mangrove Desa Kelapa Pati dianalisis berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di kawasan tersebut. Tingkat pengaruh menunjukkan kemampuan *stakeholder* dalam kinerja yang menentukan kesuksesan atau ketidaksiuksesan pengelolaan, sedangkan tingkat kepentingan berkaitan dengan *output* yang diperoleh *stakeholder* dari pengelolaan tersebut. Tingkat pengaruh dan kepentingan tersebut dapat diketahui salah satunya dengan mengacu pada tugas pokok (Tabel I) yang dimiliki oleh *stakeholder* dalam pengelolaan ekosistem mangrove di kawasan tersebut. Kesuksesan kinerja *stakeholder* dapat diketahui berdasarkan kesuksesan *stakeholder* tersebut dalam melaksanakan tugas pokoknya (Uphoff, 1986).

Tabel I *Stakeholder* yang Terlibat dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Desa Kelapa Pati

No	<i>Stakeholder</i>	Tugas Pokok
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi	Legalisasi izin, legalisasi penggunaan lahan, regulator dalam pengelolaan mangrove, pengawas
2	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten	Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah khususnya dalam bagian lingkungan hidup
3	Bupati	Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan daerah
4	Pengelola	Bekerja mengelola ekosistem mangrove

5	Perguruan Tinggi	Melaksanakan tridarma perguruan tinggi
6	Dinas Pekerjaan Umum	Pelaksanaan pembangunan dan penataan ruang
7	DPRD	Menghimpun dan menyampaikan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan dan melaksanakan proses legislasi
8	LSM	Menyuarakan ide, gagasan dan aspirasi
9	Kepala Desa	Menampung aspirasi masyarakat, mengawasi dan membina masyarakat
10	Tokoh Masyarakat	Membina dan mengawasi masyarakat
11	Masyarakat	Pengawasan tidak langsung terhadap pengelolaan ekosistem mangrove dan pemberi saran terhadap pengembangan pengembangan pengelolaan ekosistem mangrove di kawasan
12	BAPPEDA	Bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pendanaan
13	Dinas Perikanan	Mendukung pengelolaan mangrove

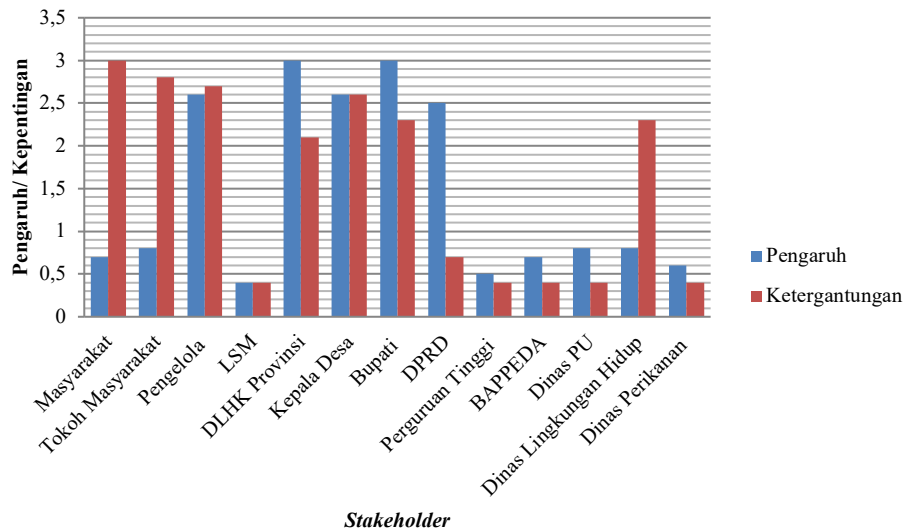
Perbedaan tugas pokok tersebut menggambarkan masing-masing kewenangan *stakeholder* dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati. Kewenangan adalah kemampuan dalam menentukan rencana dan upaya pelaksanaan kegiatan di kawasan yang dikelolanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian tingkat pengaruh dan kepentingan *stakeholder* di ekosistem mangrove Desa Kelapa Pati dianalisis dengan menggunakan analisis para pihak berdasarkan Reed *et al.* (2009). Hasil perhitungan pengaruh dan kepentingan *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan ekosistem mangrove Desa Kelapa Pati disajikan pada Tabel II.

Tabel II Penilaian Tingkat Pengaruh dan Kepentingan Para Pihak dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Desa Kelapa Pati

<i>Stakeholder</i>	Pengaruh	Kepentingan
Masyarakat	0.7	3
Tokoh Masyarakat	0.8	2.8
Pengelola	2.6	2.7
LSM	0.4	0.4
DLHK Provinsi	3	2.1
Kepala Desa	2.6	2.6
Bupati	3	2.3
DPRD	2.5	0.7
Perguruan Tinggi	0.5	0.4
Bappeda	0.7	0.4
Dinas PU	0.8	0.4
DLH Kabupaten	0.8	2.3
Dinas Perikanan	0.6	0.4

Penilaian para pihak yang terlibat dalam pengelolaan ekosistem mangrove Desa Kelapa Pati selanjutnya dikonversi ke dalam bentuk grafik. Pada Gambar 2

dapat dilihat tingkat pengaruh dan kepentingan *stakeholder* di ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati.

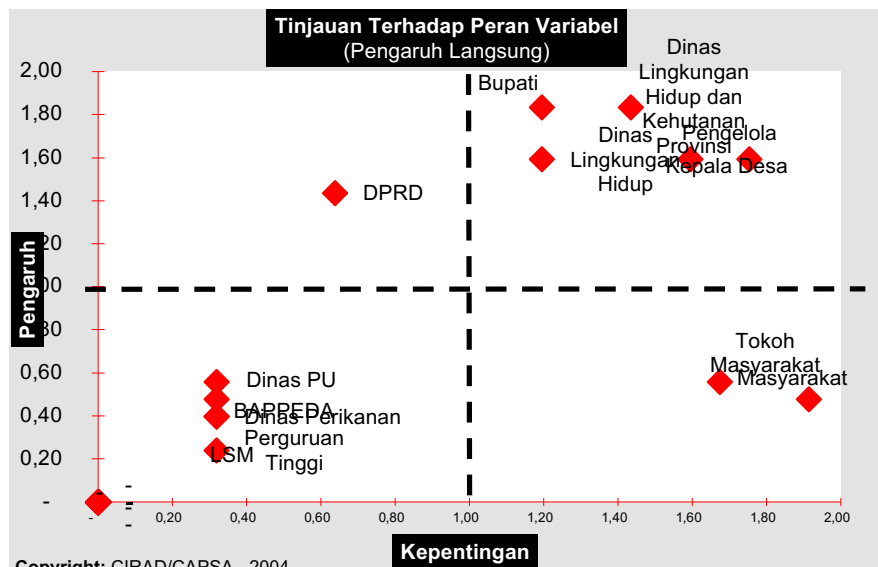


Gambar 2 Tingkat Kepentingan dan Pengaruh Para Pihak di Ekosistem Mangrove Desa Kelapa Pati

Pemetaan para pihak *stakeholder* berdasarkan pengaruh dan kepentingannya, menurut Reed *et al.* (2008) dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu 1) *Subjects*; 2) *Key Players*; 3) *Crowd*; 4) *Context setters*. Hasil analisis *stakeholder* dengan menggunakan analisis para pihak berdasarkan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati (Gambar 3) menunjukkan bahwa berdasarkan matriks tingkat pengaruh dan kepentingan *stakeholder* yang berada pada Kuadran I adalah kelompok *subject* yang terdiri dari masyarakat dan tokoh masyarakat. Hasil Kuadran *subject* pada penelitian ini mempunyai hasil yang sama dengan penelitian Muzani (2014), di mana pada kuadran *subject* ditempati oleh *stakeholder* berupa masyarakat dan tokoh masyarakat.

*Stakeholder* yang berada pada posisi ini ditempati oleh *stakeholder* yang mempunyai kepentingan tinggi dan pengaruh rendah. *Stakeholder* yang berada pada kuadran ini merupakan pihak yang menerima *output* secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati. Pengaruh rendah yang dimiliki oleh masyarakat dan tokoh masyarakat selain disebabkan oleh tidak adanya wewenang atau tugas pokok dalam pengelolaan ekosistem mangrove, selain itu juga dapat disebabkan oleh keterbatasan tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan masyarakat. Masyarakat memiliki kepentingan yang tinggi terhadap pengelolaan mangrove karena masyarakat menyadari pentingnya fungsi ekosistem mangrove yang melindungi tempat tinggal masyarakat yang berada di pinggir laut dari abrasi, intrusi air laut, dan angin laut. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Warningsih *et al.* (2019); Wahyuni *et al.* (2014); Perdana *et al.* (2018); Suprpto *et al.* (2015) dan Widiastuti *et al.* (2016) di mana masyarakat cenderung memiliki kesadaran dalam rangka melindungi ekosistem mangrove.





Gambar 3 Analisis Para Pihak Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Kuadran II adalah kelompok *key player*, yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, Bupati, Pengelola, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, dan Kepala Desa. Kuadran II adalah kuadran yang memiliki jumlah *stakeholder* terbanyak apabila dibandingkan dengan kuadran lainnya.. *Key player* yang diisi oleh banyak *stakeholder* adalah potensi bagi pengelolaan ekosistem mangrove, akan tetapi pihak yang banyak terlibat juga dapat menjadi kendala dalam memutuskan arah pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati. Keputusan dan kebijakan dari *key player* seharusnya bersifat melindungi kepentingan *stakeholder* yang memperoleh dampak dari *stakeholder* ini yaitu *subyek* (masyarakat dan tokoh masyarakat). Oleh karena itu keputusan dan kebijakan dari *key player* memerlukan inisiatif-inisiatif khusus terhadap masyarakat dan tokoh masyarakat disebabkan pihak tersebut adalah pihak yang akan menerima langsung *output* atau hasil kebijakan yang akan diputuskan oleh *key player*.

Kuadran III adalah kelompok *crowds*, yang merupakan posisi bagi kelompok *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dan pengaruh rendah. *Stakeholder* yang menempati posisi ini adalah Perguruan Tinggi, LSM, Dinas PU dan BAPPEDA. Tingkat kepentingan dan pengaruh rendah yang dimiliki oleh *stakeholder* ini menyebabkan membutuhkan pertimbangan dalam melibatkan *stakeholder* ini ke arah yang lebih jauh dalam pengelolaan, karena pengaruh dan kepentingan *stakeholder* ini bisa berubah, sehingga perlu dilakukan monitoring (Wakka, 2014). Keberadaan kelompok *crowds* merupakan advokator dalam rangka terwujudnya pengelolaan ekosistem mangrove yang diinginkan. Tingkat kepentingan dan pengaruh yang lebih kecil dibandingkan kuadran lainnya mengindikasikan bahwa pihak yang berada pada kelompok ini biasanya hanya sebatas melaksanakan tugas dan perintah yang telah dibuat, oleh karena itu pengaruh yang dimiliki dalam pengelolaan ekosistem mangrove relatif kecil.

Posisi Kuadran IV adalah kelompok *context setters*, yaitu kelompok *stakeholder* yang memiliki tingkat kepentingan rendah dan tingkat pengaruh yang tinggi. *Stakeholder* yang berada pada posisi ini adalah DPRD. DPRD mempunyai

tugas untuk memutuskan suatu kegiatan yang diusulkan oleh dinas untuk dapat dilaksanakan atau tidak pada tahun anggaran tertentu. Dalam hal ini ada kemungkinan bahkan kewenangan yang dimiliki oleh DPRD secara langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh yang besar terhadap pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati.

DPRD adalah lembaga legislatif yang berwenang dalam mempengaruhi kebijakan yang diputuskan oleh Pemerintah Daerah. Menurut Julijanti (2015) DPRD selaku lembaga legislatif berperan penting dalam mempengaruhi lembaga eksekutif dalam proses pengambilan kebijakan. Kebijakan daerah hanya akan dapat terbit atas legislasi dari DPRD. Hasil penelitian pada analisis kelembagaan yang diperoleh pada penelitian ini mempunyai hasil berbeda apabila dibandingkan dengan hasil penelitian Muzani (2014) pada ekosistem mangrove di Kabupaten Tangerang di mana posisi kuadran *context setter*, selain terdapat DPRD, juga terdapat *stakeholder* lain yaitu BAPPEDA dan BLHD (Badan Lingkungan Hidup Daerah). *Stakeholder* BAPPEDA pada penelitian ini berada pada posisi *crowds*. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh kurangnya koordinasi untuk melibatkan *stakeholder* tersebut dalam pengelolaan mangrove, atau memang dari *stakeholder* tersebut yang tidak memasukkan pengelolaan ekosistem mangrove ke dalam rencana kerjanya pada waktu anggaran tertentu. Hal tersebut dapat menjadi saran bagi pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati karena kinerja BAPPEDA berkaitan dengan masalah pendanaan. Oleh karena itu, untuk melakukan pengelolaan ekosistem mangrove yang lebih baik lagi, diperlukan koordinasi yang baik antar *stakeholder* sehingga mampu bekerjasama dalam meningkatkan pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati.

*Stakeholder* yang paling dapat menentukan arah kebijakan berdasarkan Reed *et al.* (2009) adalah kelompok *key player* dan *context setter*. *Stakeholder* yang menempati posisi tersebut terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Pengelola, Kepala Desa dan DPRD. Strategi koordinasi dan partisipasi antara *stakeholder* yang berada pada posisi tersebut harus dilaksanakan dengan maksimal untuk menentukan kebijakan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati.

*Stakeholder* khususnya yang menempati posisi *key player* perlu melakukan kerjasama yang baik dengan *stakeholder* lain dalam pengelolaan ekosistem mangrove agar pengelolaan ekosistem mangrove di lokasi tersebut dapat terwujud sesuai dengan tujuan yang diharapkan. *Key player* memainkan banyak peran dalam pengelolaan ekosistem mangrove, seperti sebagai regulator, fasilitator, implementator, dan evaluator yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan pengelolaan mangrove. *Key player* sangat membutuhkan kritik, saran, dan masukan dari *stakeholder* lain dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pengelolaan. Efektivitas pengambilan kebijakan adalah komponen integral dari suatu proyek pengelolaan (McIntyre 2008). *Key player* dalam suatu organisasi pengelolaan memiliki kemampuan yang dapat memaksa, mempunyai jaringan kekuatan dan mempunyai kemampuan menjalin kerjasama dengan *stakeholder* yang posisinya berada di bawahnya. *Stakeholder* yang berada pada kelompok *key players* adalah kelompok yang mempunyai peran sangat penting dan pengaruh yang tinggi dalam

suatu lembaga. Program yang disusun oleh stakeholder ini tentunya diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati.

### KESIMPULAN

Analisis kelembagaan ekosistem mangrove menunjukkan bahwa kelembagaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati dikelompokkan menjadi: *Key player* (Pengelola, Kepala Desa, Bupati, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten), *context setters* (DPRD), *crowds* (Dinas PU, BAPPEDA, Dinas Perikanan, LSM, dan Perguruan Tinggi); dan *subject* (Masyarakat dan Tokoh Masyarakat).

### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis. (2016, July 15). Kabupaten Bengkalis dalam Angka. Retrieved from <https://bengkaliskab.bps.go.id/publication/2016/07/15/25afc3cbeb08e8b205080ab6/kabupaten-bengkalis-dalam-angka-2016.html>
- Bratasida L. (2002). Pelestarian Ekosistem Hutan Mangrove di Provinsi DKI Jakarta. Prosiding Seminar Mangrove DKI Jakarta.
- Fauzi A. 2004. *Ekonomi Sumbredaya Alam dan Lingkungan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jhonnerie, R., V. P Siregar., B. Nababan., L. B. Prasetyo., dan S. Wouthuyzen. (2014). Deteksi Perubahan Tutupan Mangrove Menggunakan Citra Landsat Berdasarkan Klasifikasi Hibridadi Sungai Kumbang,Pulau Bengkalis, Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, 6-2: 491-506.
- Julijanti. (2015, March 26). Formulasi Strategi Komunikasi Kebijakan Kehutanan: Kasus Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan. Retrieved from <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/74536>
- McIntyre A. (2008). *Participatory Action Research..* Thousand Oaks, California: Sage Publications.
- Muzani. (2014, October 31). Optimasi Kelembagaan dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berbasis Perikanan (Kasus di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten). Retrieved from <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/69970>.
- Nybakken JW. 1992. *Biologi Laut, Suatu Pendekatan Ekologis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

- Perdana, T. A., J. Suprijanto, R. Pribadi, C. R. Collet., D. Bailly. (2018). Economic Valuation of Mangrove Ecosystem: Empirical Studies in Timbulsloko Village, Sayung, Demak, Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science: 139. doi :10.1088/1755-1315/139/1/012035.
- Reed S. M., A. Graves., N. Dandy., H. Posthumus., K. Huback., J. Morris., C. H. Prell., C. H. Quin., L. C. Stringer. (2009). Who's in and why? A Typology of Stakeholder Analysis Methods for Natural Resources Management. *Journal of Environmental Management* 90: 1933-949.
- Suprpto, D., M. Kirana., I. Susilowati., A. Fauzi. (2015). Economic Valuation of Mangrove Restoration in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 16-2: 121-130.
- Sutikno, S. (2014). Analisis Laju Abrasi Pantai Pulau Bengkalis dengan Menggunakan Data Satelit. *Jurnal Teknik Lingkungan* DOI: 10.13140/RG.2.1.2074.5766.
- Wahyuni, Y., E. I. K. Putri., S. M. Simanjuntak. (2014). Valuasi Total Ekonomi Hutan Mangrove di Kawasan Delta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 3-1: 1-12.
- Wakka, A. K. (2014). Analisis Stakeholder Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*. 3-1: 47-55.
- Warningsih, T. Kusai, Z., L. Bathara., I. Mulyani. 2019. Faktor yang Mempengaruhi *Willingness To Pay* (WTP) Masyarakat terhadap Keberadaan Ekosistem Mangrove Rokan Hilir. *Semnaskan-UGM XVI. Manajemen Sumber Daya Perikanan*: 297-300.
- Widiastuti, M. M. D., N. N. Ruata., T. Arifin. (2016). Valuasi Ekonomi Ekosistem Mangrove di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke. *Jurnal Sosek KP*, 11-2: 147-159

REVIEW REVIEWER A  
FILE 40102-1  
TANGGAL 26 JULI 2020

## ANALISIS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE DI DESA KELAPA PATI

Trisla Warningsih<sup>1</sup>, Wardatul Hidayah<sup>2</sup>, Rasoel Hamidi<sup>3</sup>

Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km 12,5, Simpang Baru Kec. Tampar, Kota Pekanbaru, 28293. Telp 0761-63266

email: trisla.t.warningsih@lecturer.unri.ac.id

### ABSTRAK

Degradasi ekosistem mangrove di Kabupaten Bengkalis terjadi salah satunya disebabkan oleh pengelolaan ekosistem mangrove yang masih belum optimal. Penelitian analisis kelembagaan pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati dilaksanakan pada bulan November 2019 di ekosistem mangrove Desa Kelapa Pati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Penilaian peran kelembagaan pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati dilakukan berdasarkan wawancara yang mendalam kepada informan berupa *stakeholder* yang telah dipilih. Analisis kelembagaan ekosistem mangrove menunjukkan bahwa kelembagaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati dikelompokkan menjadi: *Key player* (Pengelola, Kepala Desa, Bupati, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten), *context setters* (DPRD), *crowds* (Dinas PU, BAPPEDA, Dinas Perikanan, LSM, dan Perguruan Tinggi); dan *subject* (masyarakat dan tokoh masyarakat).

Kata Kunci: Analisis kelembagaan, ekosistem mangrove, Stakeholder, Desa Kelapa Pati

### ABSTRACT

*The degradation of mangrove ecosystems in Bengkalis Regency is caused either one by mangrove ecosystems management that are still not optimal. The research of institutional analysis of mangrove ecosystem management in Kelapa Pati Village was conducted in November 2019 in the mangrove ecosystem of Kelapa Pati Village, Bengkalis District, Bengkalis Regency. The assessing of institutional role about mangrove ecosystems management in Kelapa Pati Village was carried out based on in-depth interviews with informants in the form of selected stakeholders. Institutional analysis of mangrove ecosystems shows that the mangrove ecosystem institutions in Kelapa Pati Village are grouped into: Key players (Managers, Village Heads, Regents, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten), context setters (DPRD), crowds (Dinas PU, BAPPEDA, Dinas Perikanan, NGO, and University); and subjects (community and community leaders).*

Keywords: Institutional analysis, mangrove ecosystem, Stakeholder, Kelapa Pati Village

### PENDAHULUAN

Ekosistem mangrove adalah ekosistem yang didominasi oleh kelompok tumbuhan yang tipe pertumbuhannya dikategorikan ke dalam pohon, perdu, dan semak yang mampu hidup pada kondisi salinitas tinggi (Nybakken, 1982). Ekosistem mangrove memainkan peran penting, salah satunya dalam bidang ekologi, yaitu sebagai habitat bagi biota perairan, seperti udang, ikan, dan kepiting (Fauzi, 2004). Degradasi ekosistem mangrove adalah permasalahan yang banyak

**Commented [VA1]:** Judul belum membuat pembaca tertarik untuk membaca isi lebih jauh sebagai sebuah artikel. Judul ini lebih berorientasi pada penelitian yang telah dilakukan.

**Commented [VA2]:**

**Commented [VA3R2]:**

**Commented [VA4]:** Secara umum belum menunjukkan penting dan menariknya analisis kelembagaan digunakan sebagai alat analisis dibandingkan alat analisis lain dalam kajian pengelolaan mangrove

**Commented [VA5]:** Tahun tidak sama dengan daftar pustaka; Nybakken JW. 1992. *Biologi Laut, Suatu Pendekatan Ekologis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

**Commented [VA6]:** Ekosistem adalah objek dalam ekologi (ilmu), bagaimana dapat memainkan peranan? Kalimat tidak efektif dan tidak sesuai kaedah pemaknaan

terjadi pada berbagai kawasan pesisir pantai. Degradasi luas kawasan secara intens mengalami peningkatan signifikan (Bratasida, 2002).

Commented [VA7]: typo

Degradasi ekosistem mangrove salah satunya terjadi di Kabupaten Bengkalis. Pada Tahun 2011 luas ekosistem mangrove adalah sebesar 40.916 ha, luas tersebut menyusut pada Tahun 2015 menjadi 33.016 ha (BPS, 2016). Hasil penelitian Jhonnerie *et al.* (2014) juga menunjukkan bahwa telah terjadi pengurangan sebesar 197,2 hektar terhadap tutupan ekosistem mangrove dari Tahun 1996-2013 di Sungai Kembang Kabupaten Bengkalis. Dampak yang ditimbulkan dari degradasi ekosistem mangrove di Kabupaten Bengkalis salah satunya adalah terjadinya abrasi di pesisir kawasan tersebut. Hasil penelitian Sutikno (2014) menunjukkan bahwa pada rentang waktu 26 tahun (1988 - 2014) rata-rata laju abrasi di Pulau Bengkalis adalah seluas 59 ha /tahun. Abrasi tersebut telah menyebabkan berkurangnya luas daratan dengan rata-rata 42,5 ha /tahun.

Commented [VA8]: kata sambung

Commented [VA9]: tidak konsisten dengan daftar pustaka; Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis. (2016, July 15).

Commented [VA10]: Typo; 1988-2014

Degradasi ekosistem mangrove di Kabupaten Bengkalis terjadi salah satunya disebabkan oleh pengelolaan ekosistem mangrove yang masih belum optimal. Pengelolaan ekosistem mangrove seperti di kawasan lainnya melibatkan berbagai pihak dalam menentukan kebijakan terkait dengan ekosistem mangrove di kawasan tersebut. Kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove belum mampu menghasilkan keputusan yang melibatkan dan mengikutsertakan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan, sehingga hasil keputusan banyak tidak sesuai dengan kepentingan pihak lain. Kebijakan tersebut pada akhirnya memicu terjadinya konflik kepentingan sehingga pada akhirnya menimbulkan degradasi sumberdaya alam. Upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan mengantisipasi konflik telah diupayakan, namun dalam kenyataannya belum mampu mengatasi kerusakan yang terjadi.

Commented [VA11]: Kalimat ini cenderung menyimpulkan, jika dari hasil penelitian sebelumnya, sebutkan sitasinya.

Penelitian analisis kelembagaan terhadap pengelolaan ekosistem mangrove perlu untuk dilaksanakan agar dapat memetakan pihak atau *stakeholder* yang memiliki pengaruh dan kepentingan di ekosistem mangrove Desa Kelapa Pati.

## METODOLOGI PENELITIAN

Commented [VA12]: Secara umum belum sah

Penelitian analisis kelembagaan pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati dilaksanakan pada bulan November 2019 di ekosistem mangrove Desa Kelapa Pati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Informan pada penelitian ini adalah para pakar yang dinilai memiliki pengetahuan tentang pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati. Informan yang diwawancara adalah Pengelola, Kepala Desa, 2 orang yang berasal dari Dinas Perikanan, 2 orang yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup, 1 orang anggota DPR, dan 1 orang perwakilan masyarakat. Informan dipilih oleh peneliti dengan alasan bahwa mereka merupakan pimpinan secara formal yang ada di Desa Kelapa Pati, yang dianggap oleh peneliti sebagai orang-orang yang mengetahui tentang objek yang diteliti. Pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati dianalisis berdasarkan analisis para pihak.

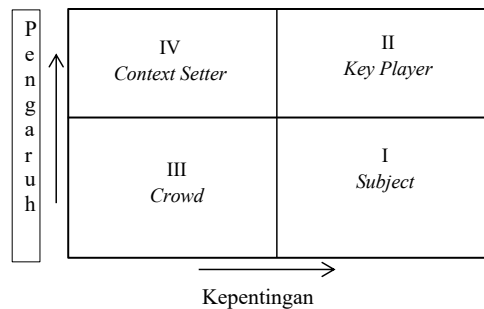
Commented [VA13]: Kalimat tidak efektif. Bagaimana peneliti dapat meneliti aspek kelembagaan di ekosistem mangrove. Pengelola ekosistem mangrove tentunya tidak berlokasi di ekosistem mangrove.

Commented [VA14]: Informan dalam penelitian kualitatif memiliki makna yang beragam. Sehingga penting untuk menjelaskan posisi penulis dalam penelitian kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini. Misal: informan dalam penelitian etnografi adalah pendamping peneliti yang menjadi penghubung peneliti dengan masyarakat lokal dalam hal Bahasa.

Analisis para pihak pada pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati dilakukan berdasarkan wawancara yang mendalam kepada informan berupa *stakeholder* yang telah dipilih dengan pemberian skor mulai dari 0 (tidak

mempunyai pengaruh), 1 (mempunyai pengaruh yang lemah), 2 (mempunyai pengaruh yang sedang), dan 3 (mempunyai pengaruh yang kuat).

Hasil skor yang diperoleh dari informan selanjutnya dipilih berdasarkan jawaban nilai yang sering muncul, selanjutnya dianalisis berdasarkan *stakeholders grid* dengan memasukkan nilai skor ke dalam *Microsoft Excel*. Nilai yang dimasukkan ke dalam *Microsoft Excel* akan membentuk matriks sehingga selanjutnya akan diketahui posisi *stakeholder* yang mengindikasikan peranan setiap *stakeholder* dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati (Gambar 1).



Gambar 1 Matriks Tingkat Pengaruh dan Kepentingan *Stakeholder* (Reed et al. 2009)

## HASIL PENELITIAN

*Stakeholder* yang berperan dalam pengelolaan ekosistem mangrove Desa Kelapa Pati dianalisis berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di kawasan tersebut. Tingkat pengaruh menunjukkan kemampuan *stakeholder* dalam kinerja yang menentukan kesuksesan atau ketidaksiuksesan pengelolaan, sedangkan tingkat kepentingan berkaitan dengan *output* yang diperoleh *stakeholder* dari pengelolaan tersebut. Tingkat pengaruh dan kepentingan tersebut dapat diketahui salah satunya dengan mengacu pada tugas pokok (Tabel I) yang dimiliki oleh *stakeholder* dalam pengelolaan ekosistem mangrove di kawasan tersebut. Kesuksesan kinerja *stakeholder* dapat diketahui berdasarkan kesuksesan *stakeholder* tersebut dalam melaksanakan tugas pokoknya (Uphoff, 1986).

Commented [VA15]: Tidak ada di daftar pustaka

Tabel I *Stakeholder* yang Terlibat dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Desa Kelapa Pati

No	<i>Stakeholder</i>	Tugas Pokok
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi	Legalisasi izin, legalisasi penggunaan lahan, regulator dalam pengelolaan mangrove, pengawas
2	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten	Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah khususnya dalam bagian lingkungan hidup
3	Bupati	Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan daerah
4	Pengelola	Bekerja mengelola ekosistem mangrove



5	Perguruan Tinggi	Melaksanakan tridarma perguruan tinggi
6	Dinas Pekerjaan Umum	Pelaksanaan pembangunan dan penataan ruang
7	DPRD	Menghimpun dan menyampaikan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan dan melaksanakan proses legislasi
8	LSM	Menyuarakan ide, gagasan dan aspirasi
9	Kepala Desa	Menampung aspirasi masyarakat, mengawasi dan membina masyarakat
10	Tokoh Masyarakat	Membina dan mengawasi masyarakat Pengawasan tidak langsung terhadap pengelolaan ekosistem mangrove dan pemberi saran terhadap pengembangan
11	Masyarakat	pengembangan pengelolaan ekosistem mangrove di kawasan
12	BAPPEDA	Bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pendanaan
13	Dinas Perikanan	Mendukung pengelolaan mangrove

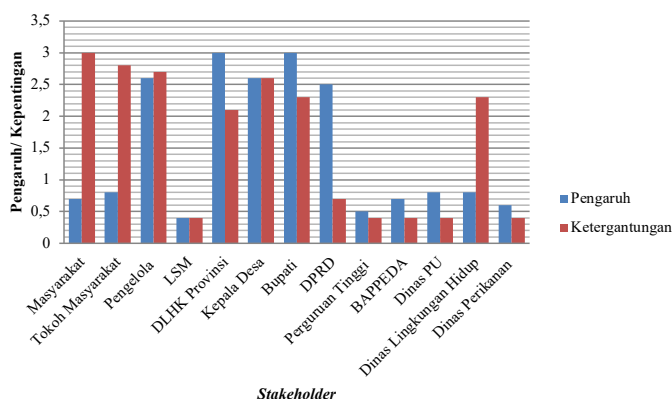
Perbedaan tugas pokok tersebut menggambarkan masing-masing kewenangan *stakeholder* dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati. Kewenangan adalah kemampuan dalam menentukan rencana dan upaya pelaksanaan kegiatan di kawasan yang dikelolanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian tingkat pengaruh dan kepentingan *stakeholder* di ekosistem mangrove Desa Kelapa Pati dianalisis dengan menggunakan analisis para pihak berdasarkan Reed *et al.* (2009). Hasil perhitungan pengaruh dan kepentingan *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan ekosistem mangrove Desa Kelapa Pati disajikan pada Tabel II.

Tabel II Penilaian Tingkat Pengaruh dan Kepentingan Para Pihak dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Desa Kelapa Pati

<i>Stakeholder</i>	Pengaruh	Kepentingan
Masyarakat	0.7	3
Tokoh Masyarakat	0.8	2.8
Pengelola	2.6	2.7
LSM	0.4	0.4
DLHK Provinsi	3	2.1
Kepala Desa	2.6	2.6
Bupati	3	2.3
DPRD	2.5	0.7
Perguruan Tinggi	0.5	0.4
Bappeda	0.7	0.4
Dinas PU	0.8	0.4
DLH Kabupaten	0.8	2.3
Dinas Perikanan	0.6	0.4

Penilaian para pihak yang terlibat dalam pengelolaan ekosistem mangrove Desa Kelapa Pati selanjutnya dikonversi ke dalam bentuk grafik. Pada Gambar 2

dapat dilihat tingkat pengaruh dan kepentingan *stakeholder* di ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati.

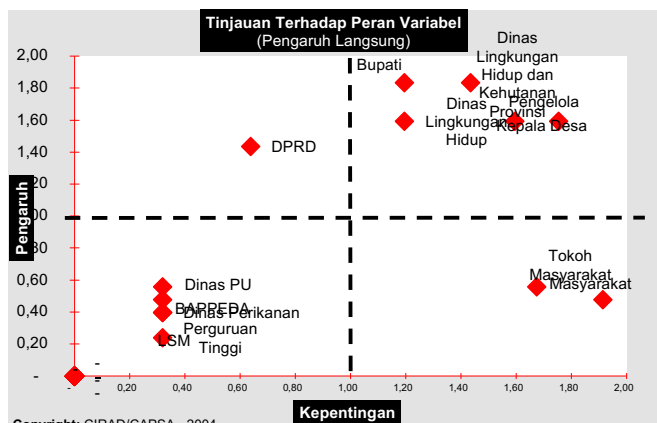


Gambar 2 Tingkat Kepentingan dan Pengaruh Para Pihak di Ekosistem Mangrove Desa Kelapa Pati

Pemetaan para pihak *stakeholder* berdasarkan pengaruh dan kepentingannya, menurut Reed *et al.* (2008) dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu 1) *Subjects*; 2) *Key Players*; 3) *Crowd*; 4) *Context setters*. Hasil analisis *stakeholder* dengan menggunakan analisis para pihak berdasarkan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati (Gambar 3) menunjukkan bahwa berdasarkan matriks tingkat pengaruh dan kepentingan *stakeholder* yang berada pada Kuadran I adalah kelompok *subject* yang terdiri dari masyarakat dan tokoh masyarakat. Hasil Kuadran *subject* pada penelitian ini mempunyai hasil yang sama dengan penelitian Muzani (2014), di mana pada kuadran *subject* ditempati oleh *stakeholder* berupa masyarakat dan tokoh masyarakat.

*Stakeholder* yang berada pada posisi ini ditempati oleh *stakeholder* yang mempunyai kepentingan tinggi dan pengaruh rendah. *Stakeholder* yang berada pada kuadran ini merupakan pihak yang menerima *output* secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati. Pengaruh rendah yang dimiliki oleh masyarakat dan tokoh masyarakat selain disebabkan oleh tidak adanya wewenang atau tugas pokok dalam pengelolaan ekosistem mangrove, selain itu juga dapat disebabkan oleh keterbatasan tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan masyarakat. Masyarakat memiliki kepentingan yang tinggi terhadap pengelolaan mangrove karena masyarakat menyadari pentingnya fungsi ekosistem mangrove yang melindungi tempat tinggal masyarakat yang berada di pinggir laut dari abrasi, intrusi air laut, dan angin laut. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Warningsih *et al.* (2019); Wahyuni *et al.* (2014); Perdana *et al.* (2018); Suprpto *et al.* (2015) dan Widiastuti *et al.* (2016) di mana masyarakat cenderung memiliki kesadaran dalam rangka melindungi ekosistem mangrove.

**Commented [VA16]:** Tidak konsisten dengan daftar pustaka; Reed S. M., A. Graves., N. Dandy., H. Posthumus., K. Huback., J. Morris., C. H. Prell., C. H. Quin., L. C. Stringer. (2009). Who's in and why? A Typology of Stakeholder Analysis Methods for Natural Resources Management. *Journal of Environmental Management* 90: 1933-949.



Gambar 3 Analisis Para Pihak Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Kuadran II adalah kelompok *key player*, yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, Bupati, Pengelola, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, dan Kepala Desa. Kuadran II adalah kuadran yang memiliki jumlah *stakeholder* terbanyak apabila dibandingkan dengan kuadran lainnya. *Key player* yang diisi oleh banyak *stakeholder* adalah potensi bagi pengelolaan ekosistem mangrove, akan tetapi pihak yang banyak terlibat juga dapat menjadi kendala dalam memutuskan arah pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati. Keputusan dan kebijakan dari *key player* seharusnya bersifat melindungi kepentingan *stakeholder* yang memperoleh dampak dari *stakeholder* ini yaitu *subyek* (masyarakat dan tokoh masyarakat). Oleh karena itu keputusan dan kebijakan dari *key player* memerlukan inisiatif-inisiatif khusus terhadap masyarakat dan tokoh masyarakat disebabkan pihak tersebut adalah pihak yang akan menerima langsung *output* atau hasil kebijakan yang akan diputuskan oleh *key player*.

Kuadran III adalah kelompok *crowds*, yang merupakan posisi bagi kelompok *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dan pengaruh rendah. *Stakeholder* yang menempati posisi ini adalah Perguruan Tinggi, LSM, Dinas PU dan BAPPEDA. Tingkat kepentingan dan pengaruh rendah yang dimiliki oleh *stakeholder* ini menyebabkan membutuhkan pertimbangan dalam melibatkan *stakeholder* ini ke arah yang lebih jauh dalam pengelolaan, karena pengaruh dan kepentingan *stakeholder* ini bisa berubah, sehingga perlu dilakukan monitoring (Wakka, 2014). Keberadaan kelompok *crowds* merupakan advokator dalam rangka terwujudnya pengelolaan ekosistem mangrove yang diinginkan. Tingkat kepentingan dan pengaruh yang lebih kecil dibandingkan kuadran lainnya mengindikasikan bahwa pihak yang berada pada kelompok ini biasanya hanya sebatas melaksanakan tugas dan perintah yang telah dibuat, oleh karena itu pengaruh yang dimiliki dalam pengelolaan ekosistem mangrove relatif kecil.

Posisi Kuadran IV adalah kelompok *context setters*, yaitu kelompok *stakeholder* yang memiliki tingkat kepentingan rendah dan tingkat pengaruh yang tinggi. *Stakeholder* yang berada pada posisi ini adalah DPRD. DPRD mempunyai

Commented [VA17]: Kualitas gambar tidak baik, sehingga makna gambar tidak terungkap dengan baik dan berisiko pada pembaca dalam menangkap pesan yang hendak disampaikan penulis

tugas untuk memutuskan suatu kegiatan yang diusulkan oleh dinas untuk dapat dilaksanakan atau tidak pada tahun anggaran tertentu. Dalam hal ini ada kemungkinan bahkan kewenangan yang dimiliki oleh DPRD secara langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh yang besar terhadap pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati.

DPRD adalah lembaga legislatif yang berwenang dalam mempengaruhi kebijakan yang diputuskan oleh Pemerintah Daerah. Menurut Julijanti (2015) DPRD selaku lembaga legislatif berperan penting dalam mempengaruhi lembaga eksekutif dalam proses pengambilan kebijakan. Kebijakan daerah hanya akan dapat terbit atas legislasi dari DPRD. Hasil penelitian pada analisis kelembagaan yang diperoleh pada penelitian ini mempunyai hasil berbeda apabila dibandingkan dengan hasil penelitian Muzani (2014) pada ekosistem mangrove di Kabupaten Tangerang di mana posisi kuadran *context setter*, selain terdapat DPRD, juga terdapat *stakeholder* lain yaitu BAPPEDA dan BLHD (Badan Lingkungan Hidup Daerah). *Stakeholder* BAPPEDA pada penelitian ini berada pada posisi *crowds*. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh kurangnya koordinasi untuk melibatkan *stakeholder* tersebut dalam pengelolaan mangrove, atau memang dari *stakeholder* tersebut yang tidak memasukkan pengelolaan ekosistem mangrove ke dalam rencana kerjanya pada waktu anggaran tertentu. Hal tersebut dapat menjadi saran bagi pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati karena kinerja BAPPEDA berkaitan dengan masalah pendanaan. Oleh karena itu, untuk melakukan pengelolaan ekosistem mangrove yang lebih baik lagi, diperlukan koordinasi yang baik antar *stakeholder* sehingga mampu bekerjasama dalam meningkatkan pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati.

*Stakeholder* yang paling dapat menentukan arah kebijakan berdasarkan Reed *et al.* (2009) adalah kelompok *key player* dan *context setter*. *Stakeholder* yang menempati posisi tersebut terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Pengelola, Kepala Desa dan DPRD. Strategi koordinasi dan partisipasi antara *stakeholder* yang berada pada posisi tersebut harus dilaksanakan dengan maksimal untuk menentukan kebijakan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati.

*Stakeholder* khususnya yang menempati posisi *key player* perlu melakukan kerjasama yang baik dengan *stakeholder* lain dalam pengelolaan ekosistem mangrove agar pengelolaan ekosistem mangrove di lokasi tersebut dapat terwujud sesuai dengan tujuan yang diharapkan. *Key player* memainkan banyak peran dalam pengelolaan ekosistem mangrove, seperti sebagai regulator, fasilitator, implementator, dan evaluator yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan pengelolaan mangrove. *Key player* sangat membutuhkan kritik, saran, dan masukan dari *stakeholder* lain dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pengelolaan. Efektivitas pengambilan kebijakan adalah komponen integral dari suatu proyek pengelolaan (McIntyre 2008). *Key player* dalam suatu organisasi pengelolaan memiliki kemampuan yang dapat memaksa, mempunyai jaringan kekuatan dan mempunyai kemampuan menjalin kerjasama dengan *stakeholder* yang posisinya berada di bawahnya. *Stakeholder* yang berada pada kelompok *key players* adalah kelompok yang mempunyai peran sangat penting dan pengaruh yang tinggi dalam

suatu lembaga. Program yang disusun oleh stakeholder ini tentunya diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati.

### KESIMPULAN

Analisis kelembagaan ekosistem mangrove menunjukkan bahwa kelembagaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati dikelompokkan menjadi: *Key player* (Pengelola, Kepala Desa, Bupati, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten), *context setters* (DPRD), *crowds* (Dinas PU, BAPPEDA, Dinas Perikanan, LSM, dan Perguruan Tinggi); dan *subject* (Masyarakat dan Tokoh Masyarakat).

### DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis. (2016, July 15). Kabupaten Bengkalis dalam Angka. Retrieved from <https://bengkaliskab.bps.go.id/publication/2016/07/15/25afc3cbeb08e8b205080ab6/kabupaten-bengkalis-dalam-angka-2016.html>

Bratasida L. (2002). Pelestarian Ekosistem Hutan Mangrove di Provinsi DKI Jakarta. Prosiding Seminar Mangrove DKI Jakarta.

Fauzi A. 2004. *Ekonomi Sumbredaya Alam dan Lingkungan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Jhonnerie, R., V. P Siregar., B. Nababan., L. B. Prasetyo., dan S. Wouthuyzen. (2014). Deteksi Perubahan Tutupan Mangrove Menggunakan Citra Landsat Berdasarkan Klasifikasi Hibridadi Sungai Kembang, Pulau Bengkalis, Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, 6-2: 491-506.

Julijanti. (2015, March 26). Formulasi Strategi Komunikasi Kebijakan Kehutanan: Kasus Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan. Retrieved from <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/74536>

McIntyre A. (2008). *Participatory Action Research*. Thousand Oaks, California: Sage Publications.

Muzani. (2014, October 31). Optimasi Kelembagaan dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berbasis Perikanan (Kasus di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten). Retrieved from <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/69970>.

Nybakken JW. 1992. *Biologi Laut, Suatu Pendekatan Ekologis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

**Commented [VA18]:** Kesimpulan masih berupa ringkasan dan belum terlihat hal yang mendorong pembaca untuk tertarik mempelajari lebih jauh tentang analisis kelembagaan yang ditawarkan oleh penulis.

**Commented [VA19]:** Format penulisan daftar pustaka

**Commented [VA20]:** typo

**Commented [VA21]:** penulisan daftar pustaka tidak lazim

- Perdana, T. A., J. Suprijanto, R. Pribadi, C. R. Collet., D. Bailly. (2018). Economic Valuation of Mangrove Ecosystem: Empirical Studies in Timbulsloko Village, Sayung, Demak, Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science: 139. doi :10.1088/1755-1315/139/1/012035.
- Reed S. M., A. Graves., N. Dandy., H. Posthumus., K. Huback., J. Morris., C. H. Prell., C. H. Quin., L. C. Stringer. (2009). Who's in and why? A Typology of Stakeholder Analysis Methods for Natural Resources Management. *Journal of Environmental Management* 90: 1933-949.
- Suprpto, D., M. Kirana., I. Susilowati., A. Fauzi. (2015). Economic Valuation of Mangrove Restoration in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 16-2: 121-130.
- Sutikno, S. (2014). Analisis Laju Abrasi Pantai Pulau Bengkalis dengan Menggunakan Data Satelit. *Jurnal Teknik Lingkungan* DOI: 10.13140/RG.2.1.2074.5766.
- Wahyuni, Y., E. I. K. Putri., S. M. Simanjuntak. (2014). Valuasi Total Ekonomi Hutan Mangrove di Kawasan Delta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 3-1: 1-12.
- Wakka, A. K. (2014). Analisis Stakeholder Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*. 3-1: 47-55.
- Warningsih, T. Kusai, Z., L. Bathara., I. Mulyani. 2019. Faktor yang Mempengaruhi *Willingness To Pay* (WTP) Masyarakat terhadap Keberadaan Ekosistem Mangrove Rokan Hilir. Semnaskan-UGM XVI. Manajemen Sumber Daya Perikanan: 297-300.
- Widiastuti, M. M. D., N. N. Ruata., T. Arifin. (2016). Valuasi Ekonomi Ekosistem Mangrove di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke. *Jurnal Sosek KP*, 11-2: 147-159

REVIEW REVIEWER B  
FILE 42706-1  
TANGGAL 23 NOVEMBER 2020

## ANALISIS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE DI DESA KELAPA PATI

Trisla Warningsih<sup>1</sup>, Wardatul Hidayah<sup>2</sup>, Rasoel Hamidi<sup>3</sup>

Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Perikanan  
dan Kelautan Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km 12,5, Simpang Baru  
Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, 28293. Telp 0761-63266

email: trisla.t.warningsih@lecturer.unri.ac.id

### ABSTRAK

Degradasi ekosistem mangrove di Kabupaten Bengkalis terjadi salah satunya disebabkan oleh pengelolaan ekosistem mangrove yang masih belum optimal. Penelitian analisis kelembagaan pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati dilaksanakan pada bulan November 2019 di ekosistem mangrove Desa Kelapa Pati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Penilaian peran kelembagaan pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati dilakukan berdasarkan wawancara yang mendalam kepada informan berupa *stakeholder* yang telah dipilih. Analisis kelembagaan ekosistem mangrove menunjukkan bahwa kelembagaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati dikelompokkan menjadi: *Key player* (Pengelola, Kepala Desa, Bupati, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten), *context setters* (DPRD), *crowds* (Dinas PU, BAPPEDA, Dinas Perikanan, LSM, dan Perguruan Tinggi); dan *subject* (masyarakat dan tokoh masyarakat).

Kata Kunci: Analisis kelembagaan, ekosistem mangrove, Stakeholder, Desa Kelapa Pati

### ABSTRACT

*The degradation of mangrove ecosystems in Bengkalis Regency is caused either one by mangrove ecosystems management that are still not optimal. The research of institutional analysis of mangrove ecosystem management in Kelapa Pati Village was conducted in November 2019 in the mangrove ecosystem of Kelapa Pati Village, Bengkalis District, Bengkalis Regency. The assessing of institutional role about mangrove ecosystems management in Kelapa Pati Village was carried out based on in-depth interviews with informants in the form of selected stakeholders. Institutional analysis of mangrove ecosystems shows that the mangrove ecosystem institutions in Kelapa Pati Village are grouped into: Key players (Managers, Village Heads, Regents, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten), context setters (DPRD), crowds (Dinas PU, BAPPEDA, Dinas Perikanan, NGO, and University); and subjects (community and community leaders).*

*Keywords: Institutional analysis, mangrove ecosystem, Stakeholder, Kelapa Pati Village*

### PENDAHULUAN

Ekosistem mangrove adalah ekosistem yang didominasi oleh kelompok tumbuhan yang tipe pertumbuhannya dikategorikan ke dalam pohon, perdu, dan semak yang mampu hidup pada kondisi salinitas tinggi (Nybakken, 1982). Ekosistem mangrove memainkan peran penting, salah satunya dalam bidang ekologi, yaitu sebagai habitat bagi biota perairan, seperti udang, ikan, dan kepiting (Fauzi, 2004). Degradasi ekosistem mangrove adalah permasalahan yang banyak

Commented [RSP1]: Kemukakan tujuan penelitian pada abstrak



terjadi pada berbagai kawasan pesisir pantai. Degradasi luas kawasan secara intens mengalami peningkatan signifikan (Bratasida, 2002).

Degradasi ekosistem mangrove salah satunya terjadi di Kabupaten Bengkalis. Pada Tahun 2011 luas ekosistem mangrove adalah sebesar 40.916 ha, luas tersebut menyusut pada Tahun 2015 menjadi 33.016 ha (BPS, 2016). Hasil penelitian Jhonnerie *et al.* (2014) juga menunjukkan bahwa telah terjadi pengurangan sebesar 197,2 hektar terhadap tutupan ekosistem mangrove dari Tahun 1996-2013 di Sungai Kambung Kabupaten Bengkalis. Dampak yang ditimbulkan dari degradasi ekosistem mangrove di Kabupaten Bengkalis salah satunya adalah terjadinya abrasi di pesisir kawasan tersebut. Hasil penelitian Sutikno (2014) menunjukkan bahwa pada rentang waktu 26 tahun (1988 - 2014) rata-rata laju abrasi di Pulau Bengkalis adalah seluas 59 ha /tahun. Abrasi tersebut telah menyebabkan berkurangnya luas daratan dengan rata-rata 42,5 ha /tahun.

Degradasi ekosistem mangrove di Kabupaten Bengkalis terjadi salah satunya disebabkan oleh pengelolaan ekosistem mangrove yang masih belum optimal. Pengelolaan ekosistem mangrove seperti di kawasan lainnya melibatkan berbagai pihak dalam menentukan kebijakan terkait dengan ekosistem mangrove di kawasan tersebut. Kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove belum mampu menghasilkan keputusan yang melibatkan dan mengikutsertakan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan, sehingga hasil keputusan banyak tidak sesuai dengan kepentingan pihak lain. Kebijakan tersebut pada akhirnya memicu terjadinya konflik kepentingan sehingga pada akhirnya menimbulkan degradasi sumberdaya alam. Upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan mengantisipasi konflik telah diupayakan, namun dalam kenyataannya belum mampu mengatasi kerusakan yang terjadi.

Penelitian analisis kelembagaan terhadap pengelolaan ekosistem mangrove perlu untuk dilaksanakan agar dapat memetakan pihak atau *stakeholder* yang memiliki pengaruh dan kepentingan di ekosistem mangrove Desa Kelapa Pati.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian analisis kelembagaan pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati dilaksanakan pada bulan November 2019 di ekosistem mangrove Desa Kelapa Pati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Informan pada penelitian ini adalah para pakar yang dinilai memiliki pengetahuan tentang pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati. Informan yang diwawancarai adalah Pengelola, Kepala Desa, 2 orang yang berasal dari Dinas Perikanan, 2 orang yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup, 1 orang anggota DPR, dan 1 orang perwakilan masyarakat. Informan dipilih oleh peneliti dengan alasan bahwa mereka merupakan pimpinan secara formal yang ada di Desa Kelapa Pati, yang dianggap oleh peneliti sebagai orang-orang yang mengetahui tentang objek yang diteliti. Pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati dianalisis berdasarkan analisis para pihak.

Analisis para pihak pada pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati dilakukan berdasarkan wawancara yang mendalam kepada informan berupa *stakeholder* yang telah dipilih dengan pemberian skor mulai dari 0 (tidak

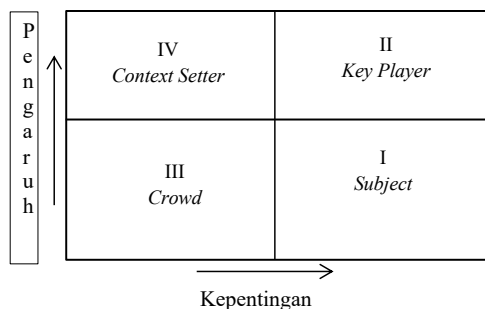
**Commented [RSP2]:** Kemukakan tujuan penelitian ini dengan ringkas dan jelas

**Deleted:**

**Commented [RSP3]:** Pada tabel I disebutkan bahwa terdapat 13 stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati, namun pada bagian ini tidak semua dimasukkan sebagai informan. Kemukakan alasannya pada bagian ini.

mempunyai pengaruh), 1 (mempunyai pengaruh yang lemah), 2 (mempunyai pengaruh yang sedang), dan 3 (mempunyai pengaruh yang kuat).

Hasil skor yang diperoleh dari informan selanjutnya dipilih berdasarkan jawaban nilai yang sering muncul, selanjutnya dianalisis berdasarkan *stakeholders grid* dengan memasukkan nilai skor ke dalam *Microsoft Excel*. Nilai yang dimasukkan ke dalam *Microsoft Excel* akan membentuk matriks sehingga selanjutnya akan diketahui posisi *stakeholder* yang mengindikasikan peranan setiap *stakeholder* dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati (Gambar 1).



Gambar 1 Matriks Tingkat Pengaruh dan Kepentingan *Stakeholder* (Reed et al. 2009)

## HASIL PENELITIAN

*Stakeholder* yang berperan dalam pengelolaan ekosistem mangrove Desa Kelapa Pati dianalisis berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di kawasan tersebut. Tingkat pengaruh menunjukkan kemampuan *stakeholder* dalam kinerja yang menentukan kesuksesan atau ketidaksiuksesan pengelolaan, sedangkan tingkat kepentingan berkaitan dengan *output* yang diperoleh *stakeholder* dari pengelolaan tersebut. Tingkat pengaruh dan kepentingan tersebut dapat diketahui salah satunya dengan mengacu pada tugas pokok (Tabel I) yang dimiliki oleh *stakeholder* dalam pengelolaan ekosistem mangrove di kawasan tersebut. Kesuksesan kinerja *stakeholder* dapat diketahui berdasarkan kesuksesan *stakeholder* tersebut dalam melaksanakan tugas pokoknya (Uphoff, 1986).

Tabel I *Stakeholder* yang Terlibat dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Desa Kelapa Pati

No	<i>Stakeholder</i>	Tugas Pokok
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi	Legalisasi izin, legalisasi penggunaan lahan, regulator dalam pengelolaan mangrove, pengawas
2	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten	Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah khususnya dalam bagian lingkungan hidup
3	Bupati	Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan daerah
4	Pengelola	Bekerja mengelola ekosistem mangrove

Commented [RSP4]: Tambahkan penjelasan mengenai analisis yang digunakan pada Gambar 3

Deleted:

5	Perguruan Tinggi	Melaksanakan tridarma perguruan tinggi
6	Dinas Pekerjaan Umum	Pelaksanaan pembangunan dan penataan ruang
7	DPRD	Menghimpun dan menyampaikan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan dan melaksanakan proses legislasi
8	LSM	Menyuarakan ide, gagasan dan aspirasi
9	Kepala Desa	Menampung aspirasi masyarakat, mengawasi dan membina masyarakat
10	Tokoh Masyarakat	Membina dan mengawasi masyarakat Pengawasan tidak langsung terhadap pengelolaan ekosistem mangrove dan pemberi saran terhadap pengembangan
11	Masyarakat	pengembangan pengelolaan ekosistem mangrove di kawasan
12	BAPPEDA	Bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pendanaan
13	Dinas Perikanan	Mendukung pengelolaan mangrove

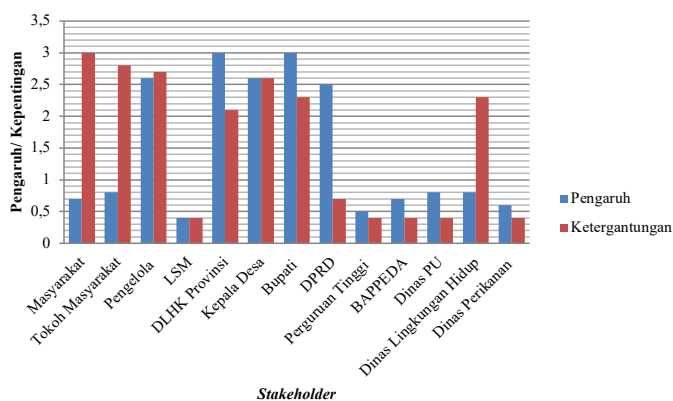
Perbedaan tugas pokok tersebut menggambarkan masing-masing kewenangan *stakeholder* dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati. Kewenangan adalah kemampuan dalam menentukan rencana dan upaya pelaksanaan kegiatan di kawasan yang dikelolanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian tingkat pengaruh dan kepentingan *stakeholder* di ekosistem mangrove Desa Kelapa Pati dianalisis dengan menggunakan analisis para pihak berdasarkan Reed *et al.* (2009). Hasil perhitungan pengaruh dan kepentingan *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan ekosistem mangrove Desa Kelapa Pati disajikan pada Tabel II.

Tabel II Penilaian Tingkat Pengaruh dan Kepentingan Para Pihak dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Desa Kelapa Pati

<i>Stakeholder</i>	Pengaruh	Kepentingan
Masyarakat	0.7	3
Tokoh Masyarakat	0.8	2.8
Pengelola	2.6	2.7
LSM	0.4	0.4
DLHK Provinsi	3	2.1
Kepala Desa	2.6	2.6
Bupati	3	2.3
DPRD	2.5	0.7
Perguruan Tinggi	0.5	0.4
Bappeda	0.7	0.4
Dinas PU	0.8	0.4
DLH Kabupaten	0.8	2.3
Dinas Perikanan	0.6	0.4

Penilaian para pihak yang terlibat dalam pengelolaan ekosistem mangrove Desa Kelapa Pati selanjutnya dikonversi ke dalam bentuk grafik. Pada Gambar 2

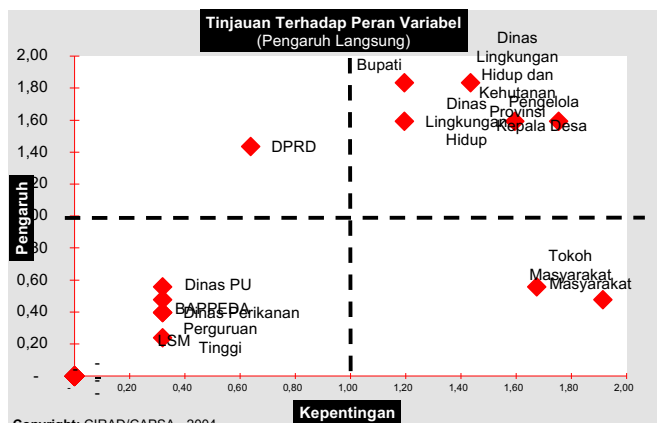
dapat dilihat tingkat pengaruh dan kepentingan *stakeholder* di ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati.



Gambar 2 Tingkat Kepentingan dan Pengaruh Para Pihak di Ekosistem Mangrove Desa Kelapa Pati

Pemetaan para pihak *stakeholder* berdasarkan pengaruh dan kepentingannya, menurut Reed *et al.* (2008) dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu 1) *Subjects*; 2) *Key Players*; 3) *Crowd*; 4) *Context setters*. Hasil analisis *stakeholder* dengan menggunakan analisis para pihak berdasarkan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati (Gambar 3) menunjukkan bahwa berdasarkan matriks tingkat pengaruh dan kepentingan *stakeholder* yang berada pada Kuadran I adalah kelompok *subject* yang terdiri dari masyarakat dan tokoh masyarakat. Hasil Kuadran *subject* pada penelitian ini mempunyai hasil yang sama dengan penelitian Muzani (2014), di mana pada kuadran *subject* ditempati oleh *stakeholder* berupa masyarakat dan tokoh masyarakat.

*Stakeholder* yang berada pada posisi ini ditempati oleh *stakeholder* yang mempunyai kepentingan tinggi dan pengaruh rendah. *Stakeholder* yang berada pada kuadran ini merupakan pihak yang menerima *output* secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati. Pengaruh rendah yang dimiliki oleh masyarakat dan tokoh masyarakat selain disebabkan oleh tidak adanya wewenang atau tugas pokok dalam pengelolaan ekosistem mangrove, selain itu juga dapat disebabkan oleh keterbatasan tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan masyarakat. Masyarakat memiliki kepentingan yang tinggi terhadap pengelolaan mangrove karena masyarakat menyadari pentingnya fungsi ekosistem mangrove yang melindungi tempat tinggal masyarakat yang berada di pinggir laut dari abrasi, intrusi air laut, dan angin laut. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Warningsih *et al.* (2019); Wahyuni *et al.* (2014); Perdana *et al.* (2018); Suprpto *et al.* (2015) dan Widiastuti *et al.* (2016) di mana masyarakat cenderung memiliki kesadaran dalam rangka melindungi ekosistem mangrove.



Gambar 3 Analisis Para Pihak Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Commented [RSP5]: Keterangan gambar multiftafsir

Kuadran II adalah kelompok *key player*, yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, Bupati, Pengelola, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, dan Kepala Desa. Kuadran II adalah kuadran yang memiliki jumlah *stakeholder* terbanyak apabila dibandingkan dengan kuadran lainnya. *Key player* yang diisi oleh banyak *stakeholder* adalah potensi bagi pengelolaan ekosistem mangrove, akan tetapi pihak yang banyak terlibat juga dapat menjadi kendala dalam memutuskan arah pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati. Keputusan dan kebijakan dari *key player* seharusnya bersifat melindungi kepentingan *stakeholder* yang memperoleh dampak dari *stakeholder* ini yaitu *subyek* (masyarakat dan tokoh masyarakat). Oleh karena itu keputusan dan kebijakan dari *key player* memerlukan inisiatif-inisiatif khusus terhadap masyarakat dan tokoh masyarakat disebabkan pihak tersebut adalah pihak yang akan menerima langsung *output* atau hasil kebijakan yang akan diputuskan oleh *key player*.

Deleted: .

Kuadran III adalah kelompok *crowds*, yang merupakan posisi bagi kelompok *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dan pengaruh rendah. *Stakeholder* yang menempati posisi ini adalah Perguruan Tinggi, LSM, Dinas PU dan BAPPEDA. Tingkat kepentingan dan pengaruh rendah yang dimiliki oleh *stakeholder* ini menyebabkan membutuhkan pertimbangan dalam melibatkan *stakeholder* ini ke arah yang lebih jauh dalam pengelolaan, karena pengaruh dan kepentingan *stakeholder* ini bisa berubah, sehingga perlu dilakukan monitoring (Wakka, 2014). Keberadaan kelompok *crowds* merupakan advokator dalam rangka terwujudnya pengelolaan ekosistem mangrove yang diinginkan. Tingkat kepentingan dan pengaruh yang lebih kecil dibandingkan kuadran lainnya mengindikasikan bahwa pihak yang berada pada kelompok ini biasanya hanya sebatas melaksanakan tugas dan perintah yang telah dibuat, oleh karena itu pengaruh yang dimiliki dalam pengelolaan ekosistem mangrove relatif kecil.

Posisi Kuadran IV adalah kelompok *context setters*, yaitu kelompok *stakeholder* yang memiliki tingkat kepentingan rendah dan tingkat pengaruh yang tinggi. *Stakeholder* yang berada pada posisi ini adalah DPRD. DPRD mempunyai

tugas untuk memutuskan suatu kegiatan yang diusulkan oleh dinas untuk dapat dilaksanakan atau tidak pada tahun anggaran tertentu. Dalam hal ini ada kemungkinan bahkan kewenangan yang dimiliki oleh DPRD secara langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh yang besar terhadap pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati.

DPRD adalah lembaga legislatif yang berwenang dalam mempengaruhi kebijakan yang diputuskan oleh Pemerintah Daerah. Menurut Julijanti (2015) DPRD selaku lembaga legislatif berperan penting dalam mempengaruhi lembaga eksekutif dalam proses pengambilan kebijakan. Kebijakan daerah hanya akan dapat terbit atas legislasi dari DPRD. Hasil penelitian pada analisis kelembagaan yang diperoleh pada penelitian ini mempunyai hasil berbeda apabila dibandingkan dengan hasil penelitian Muzani (2014) pada ekosistem mangrove di Kabupaten Tangerang di mana posisi kuadran *context setter*, selain terdapat DPRD, juga terdapat *stakeholder* lain yaitu BAPPEDA dan BLHD (Badan Lingkungan Hidup Daerah). *Stakeholder* BAPPEDA pada penelitian ini berada pada posisi *crowds*. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh kurangnya koordinasi untuk melibatkan *stakeholder* tersebut dalam pengelolaan mangrove, atau memang dari *stakeholder* tersebut yang tidak memasukkan pengelolaan ekosistem mangrove ke dalam rencana kerjanya pada waktu anggaran tertentu. Hal tersebut dapat menjadi saran bagi pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati karena kinerja BAPPEDA berkaitan dengan masalah pendanaan. Oleh karena itu, untuk melakukan pengelolaan ekosistem mangrove yang lebih baik lagi, diperlukan koordinasi yang baik antar *stakeholder* sehingga mampu bekerjasama dalam meningkatkan pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati.

*Stakeholder* yang paling dapat menentukan arah kebijakan berdasarkan Reed *et al.* (2009) adalah kelompok *key player* dan *context setter*. *Stakeholder* yang menempati posisi tersebut terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Pengelola, Kepala Desa dan DPRD. Strategi koordinasi dan partisipasi antara *stakeholder* yang berada pada posisi tersebut harus dilaksanakan dengan maksimal untuk menentukan kebijakan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati.

*Stakeholder* khususnya yang menempati posisi *key player* perlu melakukan kerjasama yang baik dengan *stakeholder* lain dalam pengelolaan ekosistem mangrove agar pengelolaan ekosistem mangrove di lokasi tersebut dapat terwujud sesuai dengan tujuan yang diharapkan. *Key player* memainkan banyak peran dalam pengelolaan ekosistem mangrove, seperti sebagai regulator, fasilitator, implementator, dan evaluator yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan pengelolaan mangrove. *Key player* sangat membutuhkan kritik, saran, dan masukan dari *stakeholder* lain dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pengelolaan. Efektivitas pengambilan kebijakan adalah komponen integral dari suatu proyek pengelolaan (McIntyre 2008). *Key player* dalam suatu organisasi pengelolaan memiliki kemampuan yang dapat memaksa, mempunyai jaringan kekuatan dan mempunyai kemampuan menjalin kerjasama dengan *stakeholder* yang posisinya berada di bawahnya. *Stakeholder* yang berada pada kelompok *key players* adalah kelompok yang mempunyai peran sangat penting dan pengaruh yang tinggi dalam

Formatted: Font: Italic

suatu lembaga. Program yang disusun oleh *stakeholder* ini tentunya diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati.

Formatted: Font: Italic

### KESIMPULAN

Analisis kelembagaan ekosistem mangrove menunjukkan bahwa kelembagaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati dikelompokkan menjadi: *Key player* (Pengelola, Kepala Desa, Bupati, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten), *context setters* (DPRD), *crowds* (Dinas PU, BAPPEDA, Dinas Perikanan, LSM, dan Perguruan Tinggi); dan *subject* (Masyarakat dan Tokoh Masyarakat).

### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis. (2016, July 15). Kabupaten Bengkalis dalam Angka. Retrieved from <https://bengkaliskab.bps.go.id/publication/2016/07/15/25afc3cbeb08e8b205080ab6/kabupaten-bengkalis-dalam-angka-2016.html>
- Bratasida L. (2002). Pelestarian Ekosistem Hutan Mangrove di Provinsi DKI Jakarta. Prosiding Seminar Mangrove DKI Jakarta.
- Fauzi A. 2004. *Ekonomi Sumbredaya Alam dan Lingkungan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jhonnerie, R., V. P Siregar., B. Nababan., L. B. Prasetyo., dan S. Wouthuyzen. (2014). Deteksi Perubahan Tutupan Mangrove Menggunakan Citra Landsat Berdasarkan Klasifikasi Hibridadi Sungai Kembang, Pulau Bengkalis, Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, 6-2: 491-506.
- Julijanti. (2015, March 26). Formulasi Strategi Komunikasi Kebijakan Kehutanan: Kasus Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan. Retrieved from <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/74536>
- McIntyre A. (2008). *Participatory Action Research*. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
- Muzani. (2014, October 31). Optimasi Kelembagaan dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berbasis Perikanan (Kasus di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten). Retrieved from <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/69970>.
- Nybakken JW. 1992. *Biologi Laut, Suatu Pendekatan Ekologis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

- Perdana, T. A., J. Suprijanto, R. Pribadi, C. R. Collet., D. Bailly. (2018). Economic Valuation of Mangrove Ecosystem: Empirical Studies in Timbulsloko Village, Sayung, Demak, Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science: 139. doi :10.1088/1755-1315/139/1/012035.
- Reed S. M., A. Graves., N. Dandy., H. Posthumus., K. Huback., J. Morris., C. H. Prell., C. H. Quin., L. C. Stringer. (2009). Who's in and why? A Typology of Stakeholder Analysis Methods for Natural Resources Management. *Journal of Environmental Management* 90: 1933-949.
- Suprpto, D., M. Kirana., I. Susilowati., A. Fauzi. (2015). Economic Valuation of Mangrove Restoration in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 16-2: 121-130.
- Sutikno, S. (2014). Analisis Laju Abrasi Pantai Pulau Bengkalis dengan Menggunakan Data Satelit. *Jurnal Teknik Lingkungan* DOI: 10.13140/RG.2.1.2074.5766.
- Wahyuni, Y., E. I. K. Putri., S. M. Simanjuntak. (2014). Valuasi Total Ekonomi Hutan Mangrove di Kawasan Delta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 3-1: 1-12.
- Wakka, A. K. (2014). Analisis Stakeholder Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*. 3-1: 47-55.
- Warningsih, T. Kusai, Z., L. Bathara., I. Mulyani. 2019. Faktor yang Mempengaruhi *Willingness To Pay* (WTP) Masyarakat terhadap Keberadaan Ekosistem Mangrove Rokan Hilir. Semnaskan-UGM XVI. Manajemen Sumber Daya Perikanan: 297-300.
- Widiastuti, M. M. D., N. N. Ruata., T. Arifin. (2016). Valuasi Ekonomi Ekosistem Mangrove di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke. *Jurnal Sosek KP*, 11-2: 147-159



PERBAIKAN REVIEWER A dan B  
FILE 42933-3  
TANGGAL 11 DESEMBER 2020

PERBAIKAN REVIEWER A dan B  
FILE 42933-3  
TANGGAL 11 DESEMBER 2020

## KELEMBAGAAN **LOKAL** PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE DI DESA KELAPA PATI

Deleted: ANALISIS

Trisla Warningsih<sup>1</sup>, Wardatul Hidayah<sup>2</sup>, Rasoel Hamidi<sup>3</sup>

Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Perikanan  
dan Kelautan Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km 12,5, Simpang Baru  
Kec. Tampar, Kota Pekanbaru, 28293. Telp 0761-63266

email: trisla.t.warningsih@lecturer.unri.ac.id

### ABSTRAK

Degradasi ekosistem mangrove di Kabupaten Bengkalis terjadi salah satunya disebabkan oleh pengelolaan ekosistem mangrove yang masih belum optimal. [Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati.](#) Penelitian analisis kelembagaan pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati dilaksanakan pada bulan November 2019 di ekosistem mangrove Desa Kelapa Pati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Penilaian peran kelembagaan pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati dilakukan berdasarkan wawancara yang mendalam kepada informan berupa *stakeholder* yang telah dipilih. Analisis kelembagaan ekosistem mangrove menunjukkan bahwa kelembagaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati dikelompokkan menjadi: *Key player* (Pengelola, Kepala Desa, Bupati, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten), *context setters* (DPRD), *crowds* (Dinas PU, BAPPEDA, Dinas Perikanan, LSM, dan Perguruan Tinggi); dan *subject* (masyarakat dan tokoh masyarakat).

Commented [RSP1]: Kemukakan tujuan penelitian pada abstrak

Kata Kunci: Analisis kelembagaan, ekosistem mangrove, Stakeholder, Desa Kelapa Pati

### ABSTRACT

*The degradation of mangrove ecosystems in Bengkalis Regency is caused either one by mangrove ecosystems management that are still not optimal. [This research aims to analysis institutional role which is involved mangrove ecosystems management in Kelapa Pati Village.](#) The research of institutional analysis of mangrove ecosystem management in Kelapa Pati Village was conducted in November 2019 in the mangrove ecosystem of Kelapa Pati Village, Bengkalis District, Bengkalis Regency. The assessing of institutional role about mangrove ecosystems management in Kelapa Pati Village was carried out based on in-depth interviews with informants in the form of selected stakeholders. Institutional analysis of mangrove ecosystems shows that the mangrove ecosystem institutions in Kelapa Pati Village are grouped into: Key players (Managers, Village Heads, Regents, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten), context setters (DPRD), crowds (Dinas PU, BAPPEDA, Dinas Perikanan, NGO, and University); and subjects (community and community leaders).*

Keywords: Institutional analysis, mangrove ecosystem, Stakeholder, Kelapa Pati Village

### PENDAHULUAN

Ekosistem mangrove adalah ekosistem yang didominasi oleh kelompok tumbuhan yang tipe pertumbuhannya dikategorikan ke dalam pohon, perdu, dan semak yang mampu hidup pada kondisi salinitas tinggi (Nybakken, 1992). Ekosistem mangrove memainkan peran penting, salah satunya sebagai habitat bagi

Formatted: Highlight

biota perairan, seperti udang, ikan, dan kepiting (Fauzi, 2004). Degradasi ekosistem mangrove adalah permasalahan yang banyak terjadi pada berbagai kawasan pesisir pantai. Degradasi luas kawasan secara intens mengalami peningkatan signifikan (Bratasida, 2002).

Degradasi ekosistem mangrove salah satunya terjadi di Kabupaten Bengkalis. Luas ekosistem mangrove pada Tahun 2011 adalah sebesar 40.916 ha, luas tersebut menyusut pada Tahun 2015 menjadi 33.016 ha (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, 2016). Hasil penelitian Jhonnerie *et al.* (2014) juga menunjukkan bahwa telah terjadi pengurangan sebesar 197,2 hektar terhadap tutupan ekosistem mangrove dari Tahun 1996-2013 di Sungai Kembang Kabupaten Bengkalis. Dampak yang ditimbulkan dari degradasi ekosistem mangrove di Kabupaten Bengkalis salah satunya adalah terjadinya abrasi di pesisir kawasan tersebut. Hasil penelitian Sutikno (2014) menunjukkan bahwa pada rentang waktu 26 tahun (1988 -2014) rata-rata laju abrasi di Pulau Bengkalis adalah seluas 59 ha /tahun. Abrasi tersebut telah menyebabkan berkurangnya luas daratan dengan rata-rata 42,5 ha /tahun.

Degradasi ekosistem mangrove di Kabupaten Bengkalis terjadi salah satunya disebabkan oleh pengelolaan ekosistem mangrove yang masih belum optimal. Pengelolaan ekosistem mangrove seperti di kawasan lainnya melibatkan berbagai pihak dalam menentukan kebijakan terkait dengan ekosistem mangrove di kawasan tersebut. Kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove belum mampu menghasilkan keputusan yang melibatkan dan mengikutsertakan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan, sehingga hasil keputusan banyak tidak sesuai dengan kepentingan pihak lain. Kebijakan tersebut pada akhirnya memicu terjadinya konflik kepentingan sehingga pada akhirnya menimbulkan degradasi sumberdaya alam. Upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan mengantisipasi konflik telah diupayakan, namun dalam kenyataannya belum mampu mengatasi kerusakan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran stakeholder dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati. Menurut Brown *et al.* (2001) analisis stakeholder adalah pengumpulan informasi dari individu atau kelompok orang yang berpengaruh di dalam memutuskan, mengelompokkan informasi dan sistem menilai kemungkinan konflik yang terjadi antara kelompok berkepentingan. Analisis kelembagaan atau stakeholders dikembangkan sebagai reaksi terhadap tantangan berbagai kepentingan dan tujuan yang ditambahkan dengan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan perumusan kebijakan dan praktik pembangunan (Grimble dan Wellard, 1996).

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian analisis kelembagaan pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati dilaksanakan pada bulan November 2019 di Kabupaten Bengkalis. Penelitian dilakukan melalui wawancara langsung antara peneliti kepada informan. Informan pada penelitian ini adalah para pakar yang dinilai memiliki pengetahuan tentang pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati. Informan adalah stakeholder yang terdiri dari Pengelola, Kepala Desa, 2 orang yang berasal dari Dinas Perikanan, 2 orang yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup, 1 orang anggota DPR, dan 1 orang perwakilan masyarakat. Informan ditentukan berdasarkan

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Deleted: ¶

Formatted: Font: Italic

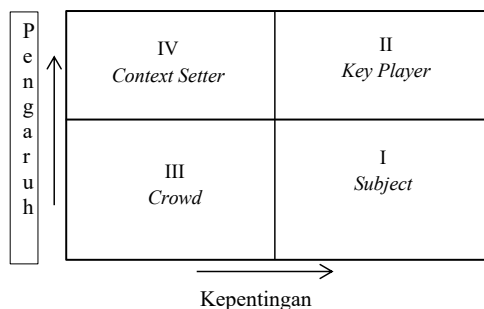
Deleted: .

teknik *purposive sampling*, para pakar dipilih karena keahlian mereka, yaitu pengetahuan spesifik yang mereka miliki yang tidak harus berupa pengetahuan akademis atau ilmiah. Informan pada penelitian ini merupakan para pihak yang berperan langsung dalam menentukan kebijakan dan kewenangan pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati. Selain itu, *stakeholder* tersebut merupakan pimpinan secara formal yang ada di Desa Kelapa Pati, yang dianggap oleh peneliti sebagai orang-orang yang mengetahui tentang objek yang diteliti.

Pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati dianalisis berdasarkan analisis para pihak. Analisis para pihak dilakukan dengan metode yang dikemukakan oleh Reed *et al.* (2009) yang bersifat deskriptif kuantitatif. Analisis para pihak ini dilaksanakan untuk mengetahui kepentingan dan pengaruh para pihak, untuk memahami sinergi dan konflik antara para pihak dan permintaan mereka untuk fungsi dan jasa ekosistem dari ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati.

Analisis para pihak pada pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati dilakukan berdasarkan wawancara yang mendalam kepada informan berupa *stakeholder* yang telah dipilih dengan pemberian skor mulai dari 0 (tidak mempunyai pengaruh), 1 (mempunyai pengaruh yang lemah), 2 (mempunyai pengaruh yang sedang), dan 3 (mempunyai pengaruh yang kuat).

Hasil skor yang diperoleh dari informan selanjutnya dipilih berdasarkan jawaban nilai yang sering muncul, selanjutnya dianalisis berdasarkan *stakeholders grid* dengan memasukkan nilai skor ke dalam *Microsoft Excel*. Nilai yang dimasukkan ke dalam *Microsoft Excel* akan membentuk matriks sehingga selanjutnya akan diketahui posisi *stakeholder* yang mengindikasikan peranan setiap *stakeholder* dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati (Gambar 1).



Gambar 1 Matriks Tingkat Pengaruh dan Kepentingan *Stakeholder* (Reed *et al.* 2009)

## HASIL PENELITIAN

*Stakeholder* yang berperan dalam pengelolaan ekosistem mangrove Desa Kelapa Pati dianalisis berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di kawasan tersebut. Tingkat pengaruh menunjukkan kemampuan *stakeholder* dalam kinerja yang menentukan kesuksesan

**Commented [RSP2]:** Pada tabel I disebutkan bahwa terdapat 13 stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati, namun pada bagian ini tidak semua dimasukkan sebagai informan. Kemukakan alasannya pada bagian ini.

**Formatted:** Font: Italic

**Commented [RSP3]:** Tambahkan penjelasan mengenai analisis yang digunakan pada Gambar 3

**Deleted:**

atau ketidaksuksesan pengelolaan, sedangkan tingkat kepentingan berkaitan dengan *output* yang diperoleh *stakeholder* dari pengelolaan tersebut. Tingkat pengaruh dan kepentingan tersebut dapat diketahui salah satunya dengan mengacu pada tugas pokok (Tabel I) yang dimiliki oleh *stakeholder* dalam pengelolaan ekosistem mangrove di kawasan tersebut. Kesuksesan kinerja *stakeholder* dapat diketahui berdasarkan kesuksesan *stakeholder* tersebut dalam melaksanakan tugas pokoknya (Uphoff, 1986).

Tabel I *Stakeholder* yang Terlibat dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Desa Kelapa Pati

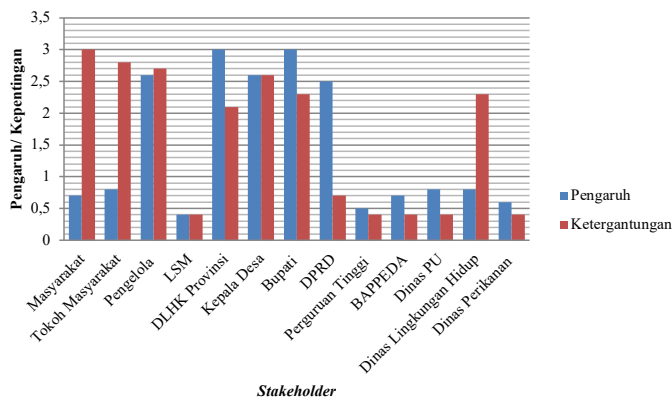
No	<i>Stakeholder</i>	Tugas Pokok
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi	Legalisasi izin, legalisasi penggunaan lahan, regulator dalam pengelolaan mangrove, pengawas
2	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten	Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah khususnya dalam bagian lingkungan hidup
3	Bupati	Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan daerah
4	Pengelola	Bekerja mengelola ekosistem mangrove
5	Perguruan Tinggi	Melaksanakan tridarma perguruan tinggi
6	Dinas Pekerjaan Umum	Pelaksanaan pembangunan dan penataan ruang
7	DPRD	Menghimpun dan menyampaikan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan dan melaksanakan proses legislasi
8	LSM	Menyuarakan ide, gagasan dan aspirasi
9	Kepala Desa	Menampung aspirasi masyarakat, mengawasi dan membina masyarakat
10	Tokoh Masyarakat	Membina dan mengawasi masyarakat
11	Masyarakat	Pengawasan tidak langsung terhadap pengelolaan ekosistem mangrove dan pemberi saran terhadap pengembangan pengembangan pengelolaan ekosistem mangrove di kawasan
12	BAPPEDA	Bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pendanaan
13	Dinas Perikanan	Mendukung pengelolaan mangrove

Perbedaan tugas pokok tersebut menggambarkan masing-masing kewenangan *stakeholder* dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati. Kewenangan adalah kemampuan dalam menentukan rencana dan upaya pelaksanaan kegiatan di kawasan yang dikelolanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian tingkat pengaruh dan kepentingan *stakeholder* di ekosistem mangrove Desa Kelapa Pati dianalisis dengan menggunakan analisis para pihak berdasarkan Reed *et al.* (2009). Hasil perhitungan pengaruh dan kepentingan *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan ekosistem mangrove Desa Kelapa Pati disajikan pada Tabel II.

Tabel II Penilaian Tingkat Pengaruh dan Kepentingan Para Pihak dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Desa Kelapa Pati

<i>Stakeholder</i>	Pengaruh	Keentingan
Masyarakat	0.7	3
Tokoh Masyarakat	0.8	2.8
Pengelola	2.6	2.7
LSM	0.4	0.4
DLHK Provinsi	3	2.1
Kepala Desa	2.6	2.6
Bupati	3	2.3
DPRD	2.5	0.7
Perguruan Tinggi	0.5	0.4
Bappeda	0.7	0.4
Dinas PU	0.8	0.4
DLH Kabupaten	0.8	2.3
Dinas Perikanan	0.6	0.4

Penilaian para pihak yang terlibat dalam pengelolaan ekosistem mangrove Desa Kelapa Pati selanjutnya dikonversi ke dalam bentuk grafik. Pada Gambar 2 dapat dilihat tingkat pengaruh dan kepentingan *stakeholder* di ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati.

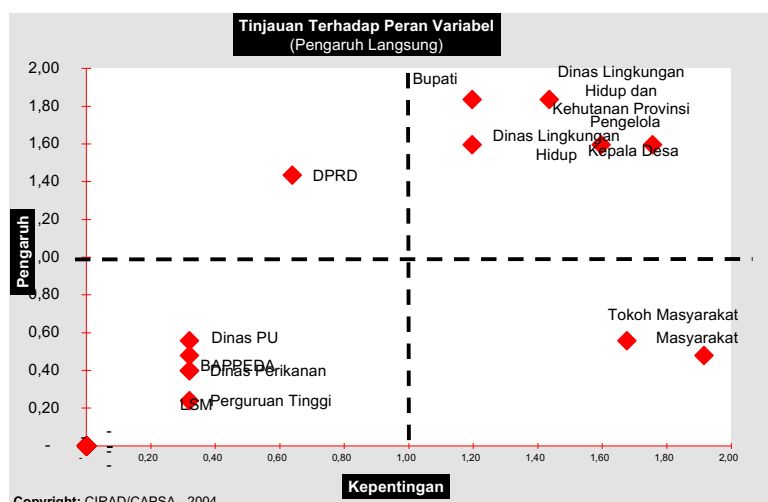


Gambar 2 Tingkat Kepentingan dan Pengaruh Para Pihak di Ekosistem Mangrove Desa Kelapa Pati

Pemetaan para pihak *stakeholder* berdasarkan pengaruh dan kepentingannya, menurut Reed *et al.* (2009) dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu 1) *Subjects*; 2) *Key Players*; 3) *Crowd*; 4) *Context setters*. Hasil analisis *stakeholder* dengan menggunakan analisis para pihak berdasarkan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati (Gambar 3) menunjukkan bahwa

berdasarkan matriks tingkat pengaruh dan kepentingan *stakeholder* yang berada pada Kuadran I adalah kelompok *subject* yang terdiri dari masyarakat dan tokoh masyarakat. Hasil Kuadran *subject* pada penelitian ini mempunyai hasil yang sama dengan penelitian Muzani (2014), di mana pada kuadran *subject* ditempati oleh *stakeholder* berupa masyarakat dan tokoh masyarakat.

*Stakeholder* yang berada pada posisi ini ditempati oleh *stakeholder* yang mempunyai kepentingan tinggi dan pengaruh rendah. *Stakeholder* yang berada pada kuadran ini merupakan pihak yang menerima *output* secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati. Pengaruh rendah yang dimiliki oleh masyarakat dan tokoh masyarakat selain disebabkan oleh tidak adanya wewenang atau tugas pokok dalam pengelolaan ekosistem mangrove, selain itu juga dapat disebabkan oleh keterbatasan tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan masyarakat. Masyarakat memiliki kepentingan yang tinggi terhadap pengelolaan mangrove karena masyarakat menyadari pentingnya fungsi ekosistem mangrove yang melindungi tempat tinggal masyarakat yang berada di pinggir laut dari abrasi, intrusi air laut, dan angin laut. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Warningsih *et al.* (2019); Wahyuni *et al.* (2014); Perdana *et al.* (2018); Suprpto *et al.* (2015) dan Widiastuti *et al.* (2016) di mana masyarakat cenderung memiliki kesadaran dalam rangka melindungi ekosistem mangrove.



Gambar 3 Analisis Para Pihak yang menunjukkan Tingkat Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder pada Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Desa Kelapa Pati.

Kuadran II adalah kelompok *key player*, yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, Bupati, Pengelola, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, dan Kepala Desa. Kuadran II adalah kuadran yang memiliki jumlah *stakeholder* terbanyak apabila dibandingkan dengan kuadran lainnya. *Key player*

- Formatted: Indent: Left: 0,75 cm, Hanging: 1,75 cm
- Commented [RSP4]: Keterangan gambar multitasir
- Formatted: Font: Italic
- Formatted: Font: Times New Roman, 10 pt
- Deleted: .



yang diisi oleh banyak *stakeholder* adalah potensi bagi pengelolaan ekosistem mangrove, akan tetapi pihak yang banyak terlibat juga dapat menjadi kendala dalam memutuskan arah pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati. Keputusan dan kebijakan dari *key player* seharusnya bersifat melindungi kepentingan *stakeholder* yang memperoleh dampak dari *stakeholder* ini yaitu *subyek* (masyarakat dan tokoh masyarakat). Oleh karena itu keputusan dan kebijakan dari *key player* memerlukan inisiatif-inisiatif khusus terhadap masyarakat dan tokoh masyarakat disebabkan pihak tersebut adalah pihak yang akan menerima langsung *output* atau hasil kebijakan yang akan diputuskan oleh *key player*.

Kuadran III adalah kelompok *crowds*, yang merupakan posisi bagi kelompok *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dan pengaruh rendah. *Stakeholder* yang menempati posisi ini adalah Perguruan Tinggi, LSM, Dinas PU dan BAPPEDA. Tingkat kepentingan dan pengaruh rendah yang dimiliki oleh *stakeholder* ini menyebabkan membutuhkan pertimbangan dalam melibatkan *stakeholder* ini ke arah yang lebih jauh dalam pengelolaan, karena pengaruh dan kepentingan *stakeholder* ini bisa berubah, sehingga perlu dilakukan monitoring (Wakka, 2014). Keberadaan kelompok *crowds* merupakan advokator dalam rangka terwujudnya pengelolaan ekosistem mangrove yang diinginkan. Tingkat kepentingan dan pengaruh yang lebih kecil dibandingkan kuadran lainnya mengindikasikan bahwa pihak yang berada pada kelompok ini biasanya hanya sebatas melaksanakan tugas dan perintah yang telah dibuat, oleh karena itu pengaruh yang dimiliki dalam pengelolaan ekosistem mangrove relatif kecil.

Posisi Kuadran IV adalah kelompok *context setters*, yaitu kelompok *stakeholder* yang memiliki tingkat kepentingan rendah dan tingkat pengaruh yang tinggi. *Stakeholder* yang berada pada posisi ini adalah DPRD. DPRD mempunyai tugas untuk memutuskan suatu kegiatan yang diusulkan oleh dinas untuk dapat dilaksanakan atau tidak pada tahun anggaran tertentu. Dalam hal ini ada kemungkinan bahkan kewenangan yang dimiliki oleh DPRD secara langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh yang besar terhadap pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati.

DPRD adalah lembaga legislatif yang berwenang dalam mempengaruhi kebijakan yang diputuskan oleh Pemerintah Daerah. Menurut Julijanti (2015) DPRD selaku lembaga legislatif berperan penting dalam mempengaruhi lembaga eksekutif dalam proses pengambilan kebijakan. Kebijakan daerah hanya akan dapat terbit atas legislasi dari DPRD. Hasil penelitian pada analisis kelembagaan yang diperoleh pada penelitian ini mempunyai hasil berbeda apabila dibandingkan dengan hasil penelitian Muzani (2014) pada ekosistem mangrove di Kabupaten Tangerang di mana posisi kuadran *context setter*, selain terdapat DPRD, juga terdapat *stakeholder* lain yaitu BAPPEDA dan BLHD (Badan Lingkungan Hidup Daerah). *Stakeholder* BAPPEDA pada penelitian ini berada pada posisi *crowds*. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh kurangnya koordinasi untuk melibatkan *stakeholder* tersebut dalam pengelolaan mangrove, atau memang dari *stakeholder* tersebut yang tidak memasukkan pengelolaan ekosistem mangrove ke dalam rencana kerjanya pada waktu anggaran tertentu. Hal tersebut dapat menjadi saran bagi pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati karena kinerja BAPPEDA berkaitan dengan masalah pendanaan. Oleh karena itu, untuk

melakukan pengelolaan ekosistem mangrove yang lebih baik lagi, diperlukan koordinasi yang baik antar *stakeholder* sehingga mampu bekerjasama dalam meningkatkan pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati.

*Stakeholder* yang paling dapat menentukan arah kebijakan berdasarkan Reed *et al.* (2009) adalah kelompok *key player* dan *context setter*. *Stakeholder* yang menempati posisi tersebut terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Pengelola, Kepala Desa dan DPRD. Strategi koordinasi dan partisipasi antara *stakeholder* yang berada pada posisi tersebut harus dilaksanakan dengan maksimal untuk menentukan kebijakan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati.

*Stakeholder* khususnya yang menempati posisi *key player* perlu melakukan kerjasama yang baik dengan *stakeholder* lain dalam pengelolaan ekosistem mangrove agar pengelolaan ekosistem mangrove di lokasi tersebut dapat terwujud sesuai dengan tujuan yang diharapkan. *Key player* memainkan banyak peran dalam pengelolaan ekosistem mangrove, seperti sebagai regulator, fasilitator, implementator, dan evaluator yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan pengelolaan mangrove. *Key player* sangat membutuhkan kritik, saran, dan masukan dari *stakeholder* lain dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pengelolaan. Efektivitas pengambilan kebijakan adalah komponen integral dari suatu proyek pengelolaan (McIntyre 2008). *Key player* dalam suatu organisasi pengelolaan memiliki kemampuan yang dapat memaksa, mempunyai jaringan kekuatan dan mempunyai kemampuan menjalin kerjasama dengan *stakeholder* yang posisinya berada di bawahnya. *Stakeholder* yang berada pada kelompok *key players* adalah kelompok yang mempunyai peran sangat penting dan pengaruh yang tinggi dalam suatu lembaga. Program yang disusun oleh *stakeholder* ini tentunya diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati.

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

## KESIMPULAN

Analisis kelembagaan ekosistem mangrove menunjukkan bahwa kelembagaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati dikelompokkan menjadi: *Key player* (Pengelola, Kepala Desa, Bupati, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten), *context setters* (DPRD), *crowds* (Dinas PU, BAPPEDA, Dinas Perikanan, LSM, dan Perguruan Tinggi); dan *subject* (Masyarakat dan Tokoh Masyarakat). *Stakeholder yang berpengaruh dalam menentukan kebijakan dalam pengelolaan adalah key player, Stakeholder yang menempati posisi key player perlu melakukan kerjasama yang baik agar kegiatan pengelolaan mangrove dapat mencapai kinerja yang diharapkan. Beberapa program kegiatan dari lembaga-lembaga tersebut diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati.*

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis. (2016, July 15). Kabupaten Bengkalis dalam Angka. Retrieved from <https://bengkalis.kab.bps.go.id/publication/2016/07/15/25afc3cbeb08e8b205080ab6/kabupaten-bengkalis-dalam-angka-2016.html>

Bratasida L. (2002). Pelestarian Ekosistem Hutan Mangrove di Provinsi DKI Jakarta. Prosiding Seminar Mangrove DKI Jakarta.

[Brown K, Tompkins E, Adger WN. \(2001\). \*Trade-off Analysis for Participatory Coastal Zone Decision-Making\*. Norwich: Overseas Development Group University of East Anglia.](#)

Fauzi A. 2004. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

[Grimble, R dan Wellard, K. \(1996\). \*Stakeholder Methodologies in Natural Resource Management: A Review of Principles, Contexts, Experiences and Opportunities\*. Paper presented at the ODA NRSP Socioeconomic Methodologies Workshop, 29-30 Apr, 1996, London, UK.](#)

Formatted: English (US)

Jhonneric, R., V. P Siregar., B. Nababan., L. B. Prasetyo., dan S. Wouthuyzen. (2014). Deteksi Perubahan Tutupan Mangrove Menggunakan Citra Landsat Berdasarkan Klasifikasi Hibridadi Sungai Kembung,Pulau Bengkalis, Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, 6-2: 491-506.

Julijanti. (2015). Formulasi Strategi Komunikasi Kebijakan Kehutanan: Kasus Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan. Retrieved from <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/74536>

McIntyre A. (2008). *Participatory Action Research*. Thousand Oaks, California: Sage Publications.

Muzani. (2014). Optimasi Kelembagaan dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berbasis Perikanan (Kasus di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten). Retrieved from <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/69970>.

Nybakken JW. 1992. *Biologi Laut, Suatu Pendekatan Ekologis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

Perdana, T. A., J. Suprijanto, R. Pribadi, C. R. Collet., D. Bailly. (2018). Economic Valuation of Mangrove Ecosystem: Empirical Studies in Timbulsloko Village, Sayung, Demak, Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science: 139. doi :10.1088/1755-1315/139/1/012035.

Reed S. M., A. Graves., N. Dandy., H. Posthumus., K. Huback., J. Morris., C. H. Prell., C. H. Quin., L. C. Stringer. (2009). Who's in and why? A Typology of Stakeholder Analysis Methods for Natural Resources Management. *Journal of Environmental Management* 90: 1933-949.

Suprpto, D., M. Kirana., I. Susilowati., A. Fauzi. (2015). Economic Valuation of Mangrove Restoration in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 16-2: 121-130.

Sutikno, S. (2014). Analisis Laju Abrasi Pantai Pulau Bengkalis dengan Menggunakan Data Satelit. *Jurnal Teknik Lingkungan* DOI: 10.13140/RG.2.1.2074.5766.

[Uphoff, N. \(1986\). Improving International Irrigational Management With Farmer-Participation: Getting The Process Right. Boulder CO. West View Press.](#)

Wahyuni, Y., E. I. K. Putri., S. M. Simanjuntak. (2014). Valuasi Total Ekonomi Hutan Mangrove di Kawasan Delta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 3-1: 1-12.

Wakka, A. K. (2014). Analisis Stakeholder Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*. 3-1: 47-55.

Warningsih, T. Kusai, Z., L. Bathara., I. Mulyani. 2019. Faktor yang Mempengaruhi *Willingness To Pay* (WTP) Masyarakat terhadap Keberadaan Ekosistem Mangrove Rokan Hilir. *Semnaskan-UGM XVI. Manajemen Sumber Daya Perikanan*: 297-300.

Widiastuti, M. M. D., N. N. Ruata., T. Arifin. (2016). Valuasi Ekonomi Ekosistem Mangrove di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke. *Jurnal Sosek KP*, 11-2: 147-159

Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm

Deleted: ¶

**COPYEDITING**  
**TANGGAL 30 DESEMBER 2020**

## KELEMBAGAAN LOKAL PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE DI DESA KELAPA PATI

Trisla Warningsih<sup>1,2</sup>, Wardatul Hidayah<sup>2</sup>, Rasoel Hamidi<sup>2</sup>

<sup>1)</sup>Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km 12,5, Simpang Baru Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, 28293. Telp 0761-63266

<sup>2)</sup>Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Riau, Pekanbaru, Jl. Pattimura No. 09 Gobah, 28131. Telp 0761-23742

email: trisla.t.warningsih@lecturer.unri.ac.id

### ABSTRAK

Degradasi ekosistem mangrove di Kabupaten Bengkalis terjadi salah satunya disebabkan oleh pengelolaan ekosistem mangrove yang masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati. Penelitian analisis kelembagaan pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati dilaksanakan pada bulan November 2019 di ekosistem mangrove Desa Kelapa Pati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Penilaian peran kelembagaan pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati dilakukan berdasarkan wawancara yang mendalam kepada informan berupa stakeholder yang telah dipilih. Analisis kelembagaan ekosistem mangrove menunjukkan bahwa kelembagaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati dikelompokkan menjadi: *Key player* (Pengelola, Kepala Desa, Bupati, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten), *context setters* (DPRD), *crowds* (Dinas PU, BAPPEDA, Dinas Perikanan, LSM, dan Perguruan Tinggi); dan *subject* (masyarakat dan tokoh masyarakat).

Kata Kunci: Analisis kelembagaan, ekosistem mangrove, Stakeholder, Desa Kelapa Pati

### ABSTRACT

The degradation of mangrove ecosystems in Bengkalis Regency is caused either one by mangrove ecosystems management that are still not optimal. This research aims to analysis institutional role which is involved mangrove ecosystems management in Kelapa Pati Village. The research of institutional analysis of mangrove ecosystem management in Kelapa Pati Village was conducted in November 2019 in the mangrove ecosystem of Kelapa Pati Village, Bengkalis District, Bengkalis Regency. The assessing of institutional role about mangrove ecosystems management in Kelapa Pati Village was carried out based on in-depth interviews with informants in the form of selected stakeholders. Institutional analysis of mangrove ecosystems shows that the mangrove ecosystem institutions in Kelapa Pati Village are grouped into: *Key players* (Managers, Village Heads, Regents, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten), *context setters* (DPRD), *crowds* (Dinas PU, BAPPEDA, Dinas Perikanan, NGO, and University); and *subjects* (community and community leaders).

Keywords: Institutional analysis, mangrove ecosystem, Stakeholder, Kelapa Pati Village

### PENDAHULUAN

Deleted: ANALISIS

Deleted: <sup>3</sup>

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt, Superscript

Formatted: Normal, Centered

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt

Formatted: Font: Times New Roman, Italic

Formatted: Font: Italic

Commented [RSP1]: Kemukakan tujuan penelitian pada abstrak

Ekosistem mangrove adalah ekosistem yang didominasi oleh kelompok tumbuhan yang tipe pertumbuhannya dikategorikan ke dalam pohon, perdu, dan semak yang mampu hidup pada kondisi salinitas tinggi (Nybakken, 1992). Ekosistem mangrove memainkan peran penting, salah satunya sebagai habitat bagi biota perairan, seperti udang, ikan, dan kepiting (Fauzi, 2004). Degradasi ekosistem mangrove adalah permasalahan yang banyak terjadi pada berbagai kawasan pesisir pantai. Degradasi luas kawasan secara intens mengalami peningkatan signifikan (Bratasida, 2002).

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

Degradasi ekosistem mangrove salah satunya terjadi di Kabupaten Bengkalis. Luas ekosistem mangrove pada Tahun 2011 adalah sebesar 40.916 ha, luas tersebut menyusut pada Tahun 2015 menjadi 33.016 ha (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, 2016). Hasil penelitian Jhonnerie *et al.* (2014) juga menunjukkan bahwa telah terjadi pengurangan sebesar 197,2 hektar terhadap tutupan ekosistem mangrove dari Tahun 1996-2013 di Sungai Kembang Kabupaten Bengkalis. Dampak yang ditimbulkan dari degradasi ekosistem mangrove di Kabupaten Bengkalis salah satunya adalah terjadinya abrasi di pesisir kawasan tersebut. Hasil penelitian Sutikno (2014) menunjukkan bahwa pada rentang waktu 26 tahun (1988 -2014) rata-rata laju abrasi di Pulau Bengkalis adalah seluas 59 ha /tahun. Abrasi tersebut telah menyebabkan berkurangnya luas daratan dengan rata-rata 42,5 ha /tahun.

Degradasi ekosistem mangrove di Kabupaten Bengkalis terjadi salah satunya disebabkan oleh pengelolaan ekosistem mangrove yang masih belum optimal. Pengelolaan ekosistem mangrove seperti di kawasan lainnya melibatkan berbagai pihak dalam menentukan kebijakan terkait dengan ekosistem mangrove di kawasan tersebut. Kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove belum mampu menghasilkan keputusan yang melibatkan dan mengikutserakan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan, sehingga hasil keputusan banyak tidak sesuai dengan kepentingan pihak lain. Kebijakan tersebut pada akhirnya memicu terjadinya konflik kepentingan sehingga pada akhirnya menimbulkan degradasi sumberdaya alam. Upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan mengantisipasi konflik telah diupayakan, namun dalam kenyataannya belum mampu mengatasi kerusakan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran stakeholder dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati. Menurut Brown *et al.* (2001) analisis stakeholder adalah pengumpulan informasi dari individu atau kelompok orang yang berpengaruh di dalam memutuskan, mengelompokkan informasi dan sistem menilai kemungkinan konflik yang terjadi antara kelompok berkepentingan. Analisis kelembagaan atau stakeholders dikembangkan sebagai reaksi terhadap tantangan berbagai kepentingan dan tujuan yang ditambahkan dengan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan perumusan kebijakan dan praktik pembangunan (Grimble dan Wellard, 1996).

Formatted: Highlight

Formatted: Justified

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Deleted: ¶

## METODOLOGI PENELITIAN

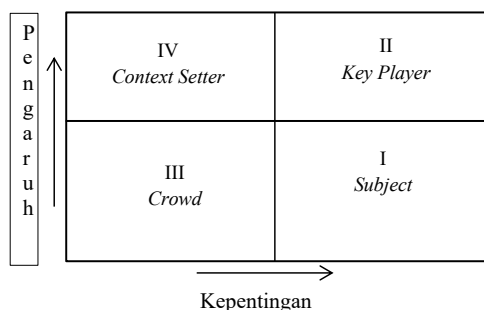
Penelitian analisis kelembagaan pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati dilaksanakan pada bulan November 2019 di Kabupaten Bengkalis. Penelitian dilakukan melalui wawancara langsung antara peneliti kepada informan. Informan pada penelitian ini adalah para pakar yang dinilai memiliki pengetahuan

tentang pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati. **Informan adalah stakeholder yang terdiri dari** Pengelola, Kepala Desa, 2 orang yang berasal dari Dinas Perikanan, 2 orang yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup, 1 orang anggota DPR, dan 1 orang perwakilan masyarakat. Informan ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling*, para pakar dipilih karena keahlian mereka, yaitu pengetahuan spesifik yang mereka miliki yang tidak harus berupa pengetahuan akademis atau ilmiah. Informan pada penelitian ini merupakan para pihak yang berperan langsung dalam menentukan kebijakan dan kewenangan pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati. Selain itu, *stakeholder* tersebut merupakan pimpinan secara formal yang ada di Desa Kelapa Pati, yang dianggap oleh peneliti sebagai orang-orang yang mengetahui tentang objek yang diteliti.

Pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati dianalisis berdasarkan analisis para pihak. Analisis para pihak dilakukan dengan metode yang dikemukakan oleh Reed *et al.* (2009) yang bersifat deskriptif kuantitatif. Analisis para pihak ini dilaksanakan untuk mengetahui kepentingan dan pengaruh para pihak, untuk memahami sinergi dan konflik antara para pihak dan permintaan mereka untuk fungsi dan jasa ekosistem dari ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati.

Analisis para pihak pada pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati dilakukan berdasarkan wawancara yang mendalam kepada informan berupa *stakeholder* yang telah dipilih dengan pemberian skor mulai dari 0 (tidak mempunyai pengaruh), 1 (mempunyai pengaruh yang lemah), 2 (mempunyai pengaruh yang sedang), dan 3 (mempunyai pengaruh yang kuat).

Hasil skor yang diperoleh dari informan selanjutnya dipilih berdasarkan jawaban nilai yang sering muncul, selanjutnya dianalisis berdasarkan *stakeholders grid* dengan memasukkan nilai skor ke dalam *Microsoft Excel*. Nilai yang dimasukkan ke dalam *Microsoft Excel* akan membentuk matriks sehingga selanjutnya akan diketahui posisi *stakeholder* yang mengindikasikan peranan setiap *stakeholder* dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati (Gambar 1).



Gambar 1 Matriks Tingkat Pengaruh dan Kepentingan *Stakeholder* (Reed *et al.* 2009)

## HASIL PENELITIAN

Formatted: Highlight

Formatted: Font: Italic, Highlight

Formatted: Highlight

Deleted: .

Commented [RSP2]: Pada tabel I disebutkan bahwa terdapat 13 stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati, namun pada bagian ini tidak semua dimasukkan sebagai informan. Kemukakan alasannya pada bagian ini.

Formatted: Font: Italic

Commented [RSP3]: Tambahkan penjelasan mengenai analisis yang digunakan pada Gambar 3

Deleted:



*Stakeholder* yang berperan dalam pengelolaan ekosistem mangrove Desa Kelapa Pati dianalisis berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di kawasan tersebut. Tingkat pengaruh menunjukkan kemampuan *stakeholder* dalam kinerja yang menentukan kesuksesan atau ketidaksiuksesan pengelolaan, sedangkan tingkat kepentingan berkaitan dengan *output* yang diperoleh *stakeholder* dari pengelolaan tersebut. Tingkat pengaruh dan kepentingan tersebut dapat diketahui salah satunya dengan mengacu pada tugas pokok (Tabel I) yang dimiliki oleh *stakeholder* dalam pengelolaan ekosistem mangrove di kawasan tersebut. Kesuksesan kinerja *stakeholder* dapat diketahui berdasarkan kesuksesan *stakeholder* tersebut dalam melaksanakan tugas pokoknya (Uphoff, 1986).

Tabel I *Stakeholder* yang Terlibat dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Desa Kelapa Pati

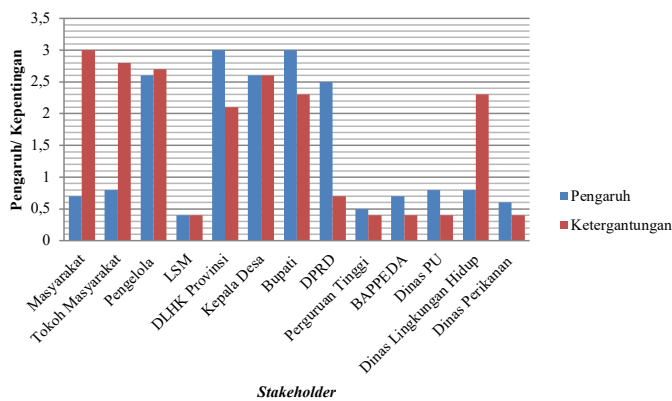
No	<i>Stakeholder</i>	Tugas Pokok
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi	Legalisasi izin, legalisasi penggunaan lahan, regulator dalam pengelolaan mangrove, pengawas
2	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten	Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah khususnya dalam bagian lingkungan hidup
3	Bupati	Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan daerah
4	Pengelola	Bekerja mengelola ekosistem mangrove
5	Perguruan Tinggi	Melaksanakan tridarma perguruan tinggi
6	Dinas Pekerjaan Umum	Pelaksanaan pembangunan dan penataan ruang
7	DPRD	Menghimpun dan menyampaikan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan dan melaksanakan proses legislasi
8	LSM	Menyuarakan ide, gagasan dan aspirasi
9	Kepala Desa	Menampung aspirasi masyarakat, mengawasi dan membina masyarakat
10	Tokoh Masyarakat	Membina dan mengawasi masyarakat
11	Masyarakat	Pengawasan tidak langsung terhadap pengelolaan ekosistem mangrove dan pemberi saran terhadap pengembangan pengembangan pengelolaan ekosistem mangrove di kawasan
12	BAPPEDA	Bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pendanaan
13	Dinas Perikanan	Mendukung pengelolaan mangrove

Perbedaan tugas pokok tersebut menggambarkan masing-masing kewenangan *stakeholder* dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati. Kewenangan adalah kemampuan dalam menentukan rencana dan upaya pelaksanaan kegiatan di kawasan yang dikelolanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian tingkat pengaruh dan kepentingan *stakeholder* di ekosistem mangrove Desa Kelapa Pati dianalisis dengan menggunakan analisis para pihak berdasarkan Reed *et al.* (2009). Hasil perhitungan pengaruh dan kepentingan *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan ekosistem mangrove Desa Kelapa Pati disajikan pada Tabel II.

Tabel II Penilaian Tingkat Pengaruh dan Kepentingan Para Pihak dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Desa Kelapa Pati

Stakeholder	Pengaruh	Kepentingan
Masyarakat	0.7	3
Tokoh Masyarakat	0.8	2.8
Pengelola	2.6	2.7
LSM	0.4	0.4
DLHK Provinsi	3	2.1
Kepala Desa	2.6	2.6
Bupati	3	2.3
DPRD	2.5	0.7
Perguruan Tinggi	0.5	0.4
Bappeda	0.7	0.4
Dinas PU	0.8	0.4
DLH Kabupaten	0.8	2.3
Dinas Perikanan	0.6	0.4

Penilaian para pihak yang terlibat dalam pengelolaan ekosistem mangrove Desa Kelapa Pati selanjutnya dikonversi ke dalam bentuk grafik. Pada Gambar 2 dapat dilihat tingkat pengaruh dan kepentingan stakeholder di ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati.

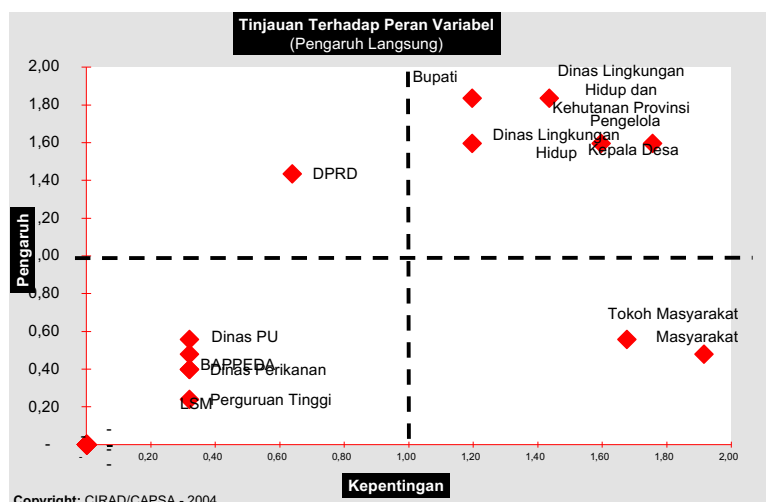


Gambar 2 Tingkat Kepentingan dan Pengaruh Para Pihak di Ekosistem Mangrove Desa Kelapa Pati

Pemetaan para pihak stakeholder berdasarkan pengaruh dan kepentingannya, menurut Reed *et al.* (2009) dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu 1) *Subjects*; 2) *Key Players*; 3) *Crowd*; 4) *Context setters*. Hasil analisis stakeholder

dengan menggunakan analisis para pihak berdasarkan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati (Gambar 3) menunjukkan bahwa berdasarkan matriks tingkat pengaruh dan kepentingan *stakeholder* yang berada pada Kuadran I adalah kelompok *subject* yang terdiri dari masyarakat dan tokoh masyarakat. Hasil Kuadran *subject* pada penelitian ini mempunyai hasil yang sama dengan penelitian Muzani (2014), di mana pada kuadran *subject* ditempati oleh *stakeholder* berupa masyarakat dan tokoh masyarakat.

*Stakeholder* yang berada pada posisi ini ditempati oleh *stakeholder* yang mempunyai kepentingan tinggi dan pengaruh rendah. *Stakeholder* yang berada pada kuadran ini merupakan pihak yang menerima *output* secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati. Pengaruh rendah yang dimiliki oleh masyarakat dan tokoh masyarakat selain disebabkan oleh tidak adanya wewenang atau tugas pokok dalam pengelolaan ekosistem mangrove, selain itu juga dapat disebabkan oleh keterbatasan tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan masyarakat. Masyarakat memiliki kepentingan yang tinggi terhadap pengelolaan mangrove karena masyarakat menyadari pentingnya fungsi ekosistem mangrove yang melindungi tempat tinggal masyarakat yang berada di pinggir laut dari abrasi, intrusi air laut, dan angin laut. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Warningsih *et al.* (2019); Wahyuni *et al.* (2014); Perdana *et al.* (2018); Suprpto *et al.* (2015) dan Widiastuti *et al.* (2016) di mana masyarakat cenderung memiliki kesadaran dalam rangka melindungi ekosistem mangrove.



Gambar 3 Analisis Para Pihak yang menunjukkan Tingkat Kepentingan dan Pengaruh *Stakeholder* pada Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Desa Kelapa Pati

Kuadran II adalah kelompok *key player*, yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, Bupati, Pengelola, Dinas Lingkungan Hidup

Formatted: Indent: Left: 0,75 cm, Hanging: 1,75 cm

Commented [RSP4]: Keterangan gambar multitaftisr

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Times New Roman, 10 pt

Kabupaten, dan Kepala Desa. Kuadran II adalah kuadran yang memiliki jumlah *stakeholder* terbanyak apabila dibandingkan dengan kuadran lainnya. *Key player* yang diisi oleh banyak *stakeholder* adalah potensi bagi pengelolaan ekosistem mangrove, akan tetapi pihak yang banyak terlibat juga dapat menjadi kendala dalam memutuskan arah pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati. Keputusan dan kebijakan dari *key player* seharusnya bersifat melindungi kepentingan *stakeholder* yang memperoleh dampak dari *stakeholder* ini yaitu *subyek* (masyarakat dan tokoh masyarakat). Oleh karena itu keputusan dan kebijakan dari *key player* memerlukan inisiatif-inisiatif khusus terhadap masyarakat dan tokoh masyarakat disebabkan pihak tersebut adalah pihak yang akan menerima langsung *output* atau hasil kebijakan yang akan diputuskan oleh *key player*.

Kuadran III adalah kelompok *crowds*, yang merupakan posisi bagi kelompok *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dan pengaruh rendah. *Stakeholder* yang menempati posisi ini adalah Perguruan Tinggi, LSM, Dinas PU dan BAPPEDA. Tingkat kepentingan dan pengaruh rendah yang dimiliki oleh *stakeholder* ini menyebabkan membutuhkan pertimbangan dalam melibatkan *stakeholder* ini ke arah yang lebih jauh dalam pengelolaan, karena pengaruh dan kepentingan *stakeholder* ini bisa berubah, sehingga perlu dilakukan monitoring (Wakka, 2014). Keberadaan kelompok *crowds* merupakan advokator dalam rangka terwujudnya pengelolaan ekosistem mangrove yang diinginkan. Tingkat kepentingan dan pengaruh yang lebih kecil dibandingkan kuadran lainnya mengindikasikan bahwa pihak yang berada pada kelompok ini biasanya hanya sebatas melaksanakan tugas dan perintah yang telah dibuat, oleh karena itu pengaruh yang dimiliki dalam pengelolaan ekosistem mangrove relatif kecil.

Posisi Kuadran IV adalah kelompok *context setters*, yaitu kelompok *stakeholder* yang memiliki tingkat kepentingan rendah dan tingkat pengaruh yang tinggi. *Stakeholder* yang berada pada posisi ini adalah DPRD. DPRD mempunyai tugas untuk memutuskan suatu kegiatan yang diusulkan oleh dinas untuk dapat dilaksanakan atau tidak pada tahun anggaran tertentu. Dalam hal ini ada kemungkinan bahkan kewenangan yang dimiliki oleh DPRD secara langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh yang besar terhadap pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati.

DPRD adalah lembaga legislatif yang berwenang dalam mempengaruhi kebijakan yang diputuskan oleh Pemerintah Daerah. Menurut Julijanti (2015) DPRD selaku lembaga legislatif berperan penting dalam mempengaruhi lembaga eksekutif dalam proses pengambilan kebijakan. Kebijakan daerah hanya akan dapat terbit atas legislasi dari DPRD. Hasil penelitian pada analisis kelembagaan yang diperoleh pada penelitian ini mempunyai hasil berbeda apabila dibandingkan dengan hasil penelitian Muzani (2014) pada ekosistem mangrove di Kabupaten Tangerang di mana posisi kuadran *context setter*, selain terdapat DPRD, juga terdapat *stakeholder* lain yaitu BAPPEDA dan BLHD (Badan Lingkungan Hidup Daerah). *Stakeholder* BAPPEDA pada penelitian ini berada pada posisi *crowds*. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh kurangnya koordinasi untuk melibatkan *stakeholder* tersebut dalam pengelolaan mangrove, atau memang dari *stakeholder* tersebut yang tidak memasukkan pengelolaan ekosistem mangrove ke dalam rencana kerjanya pada waktu anggaran tertentu. Hal tersebut dapat menjadi saran

Deleted: .

bagi pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati karena kinerja BAPPEDA berkaitan dengan masalah pendanaan. Oleh karena itu, untuk melakukan pengelolaan ekosistem mangrove yang lebih baik lagi, diperlukan koordinasi yang baik antar *stakeholder* sehingga mampu bekerjasama dalam meningkatkan pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati.

*Stakeholder* yang paling dapat menentukan arah kebijakan berdasarkan Reed *et al.* (2009) adalah kelompok *key player* dan *context setter*. *Stakeholder* yang menempati posisi tersebut terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Pengelola, Kepala Desa dan DPRD. Strategi koordinasi dan partisipasi antara *stakeholder* yang berada pada posisi tersebut harus dilaksanakan dengan maksimal untuk menentukan kebijakan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati.

*Stakeholder* khususnya yang menempati posisi *key player* perlu melakukan kerjasama yang baik dengan *stakeholder* lain dalam pengelolaan ekosistem mangrove agar pengelolaan ekosistem mangrove di lokasi tersebut dapat terwujud sesuai dengan tujuan yang diharapkan. *Key player* memainkan banyak peran dalam pengelolaan ekosistem mangrove, seperti sebagai regulator, fasilitator, implementator, dan evaluator yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan pengelolaan mangrove. *Key player* sangat membutuhkan kritik, saran, dan masukan dari *stakeholder* lain dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pengelolaan. Efektivitas pengambilan kebijakan adalah komponen integral dari suatu proyek pengelolaan (McIntyre 2008). *Key player* dalam suatu organisasi pengelolaan memiliki kemampuan yang dapat memaksa, mempunyai jaringan kekuatan dan mempunyai kemampuan menjalin kerjasama dengan *stakeholder* yang posisinya berada di bawahnya. *Stakeholder* yang berada pada kelompok *key players* adalah kelompok yang mempunyai peran sangat penting dan pengaruh yang tinggi dalam suatu lembaga. Program yang disusun oleh *stakeholder* ini tentunya diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati.

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

## KESIMPULAN

Analisis kelembagaan ekosistem mangrove menunjukkan bahwa kelembagaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati dikelompokkan menjadi: *Key player* (Pengelola, Kepala Desa, Bupati, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten), *context setters* (DPRD), *crowds* (Dinas PU, BAPPEDA, Dinas Perikanan, LSM, dan Perguruan Tinggi); dan *subject* (Masyarakat dan Tokoh Masyarakat). *Stakeholder yang berpengaruh dalam menentukan kebijakan dalam pengelolaan adalah key player. Stakeholder yang menempati posisi key player perlu melakukan kerjasama yang baik agar kegiatan pengelolaan mangrove dapat mencapai kinerja yang diharapkan. Beberapa program kegiatan dari lembaga-lembaga tersebut diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Kelapa Pati.*

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis. (2016, July 15). Kabupaten Bengkalis dalam Angka. Retrieved from

<https://bengkalis.kab.bps.go.id/publication/2016/07/15/25afc3cbeb08e8b205080ab6/kabupaten-bengkalis-dalam-angka-2016.html>

Bratasida L. (2002). Pelestarian Ekosistem Hutan Mangrove di Provinsi DKI Jakarta. Prosiding Seminar Mangrove DKI Jakarta.

[Brown K, Tompkins E, Adger WN. \(2001\). \*Trade-off Analysis for Participatory Coastal Zone Decision-Making\*. Norwich: Overseas Development Group University of East Anglia.](#)

Fauzi A. 2004. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

[Grimble, R dan Wellard, K. \(1996\). \*Stakeholder Methodologies in Natural Resource Management: A Review of Principles, Contexts, Experiences and Opportunities\*. Paper presented at the ODA NRSP Socioeconomic Methodologies Workshop, 29-30 Apr, 1996, London, UK.](#)

Formatted: English (US)

Jhonnerie, R., V. P Siregar., B. Nababan., L. B. Prasetyo., dan S. Wouthuyzen. (2014). Deteksi Perubahan Tutupan Mangrove Menggunakan Citra Landsat Berdasarkan Klasifikasi Hibridadi Sungai Kembung, Pulau Bengkalis, Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, 6-2: 491-506.

Julijanti. (2015). Formulasi Strategi Komunikasi Kebijakan Kehutanan: Kasus Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan. Retrieved from <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/74536>

McIntyre A. (2008). *Participatory Action Research*. Thousand Oaks, California: Sage Publications.

Muzani. (2014). Optimasi Kelembagaan dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berbasis Perikanan (Kasus di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten). Retrieved from <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/69970>.

Nybakken JW. 1992. *Biologi Laut, Suatu Pendekatan Ekologis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

Perdana, T. A., J. Suprijanto, R. Pribadi, C. R. Collet., D. Bailly. (2018). Economic Valuation of Mangrove Ecosystem: Empirical Studies in Timbulsloko Village, Sayung, Demak, Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science: 139. doi :10.1088/1755-1315/139/1/012035.

Reed S. M., A. Graves., N. Dandy., H. Posthumus., K. Huback., J. Morris., C. H. Prell., C. H. Quin., L. C. Stringer. (2009). Who's in and why? A Typology

of Stakeholder Analysis Methods for Natural Resources Management. *Journal of Environmental Management* 90: 1933-949.

Suprpto, D., M. Kirana., I. Susilowati., A. Fauzi. (2015). Economic Valuation of Mangrove Restoration in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 16-2: 121-130.

Sutikno, S. (2014). Analisis Laju Abrasi Pantai Pulau Bengkalis dengan Menggunakan Data Satelit. *Jurnal Teknik Lingkungan* DOI: 10.13140/RG.2.1.2074.5766.

[Uphoff, N. \(1986\). Improving International Irrigational Management With Farmer Participation; Getting The Process Right, Boulder CO. West View Press.](#)

Wahyuni, Y., E. I. K. Putri., S. M. Simanjuntak. (2014). Valuasi Total Ekonomi Hutan Mangrove di Kawasan Delta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 3-1: 1-12.

Wakka, A. K. (2014). Analisis Stakeholder Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*. 3-1: 47-55.

Warningsih, T. Kusai, Z., L. Bathara., I. Mulyani. 2019. Faktor yang Mempengaruhi *Willingness To Pay* (WTP) Masyarakat terhadap Keberadaan Ekosistem Mangrove Rokan Hilir. *Semnaskan-UGM XVI. Manajemen Sumber Daya Perikanan*: 297-300.

Widiastuti, M. M. D., N. N. Ruata., T. Arifin. (2016). Valuasi Ekonomi Ekosistem Mangrove di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke. *Jurnal Sosek KP*, 11-2: 147-159

Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm

Deleted: ¶

Formatted: English (US)

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 1,25 cm